



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jalan Ronggowarsito Nomor 298 Pejagoan - Kebumen
Telepon/Faksimile (0287)
Kode Pos 54361

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/03.1 / KEP/1/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka dalam proses pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 35)
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 107)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- b. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 2. membantu Ketua Satuan Tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 3. membantu ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. membantu Ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Memberikan masukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

KETIGA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada tanggal :



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/03.1/KEP/1/2021
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Ketua
3.	Kasubbag. Perencanaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
6.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
8.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubbag Keuangan	Anggota
10.	Kasi Perbenihan dan Perlindungan pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
11.	Kasi Produksi pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
12.	Kasi Pengolahan dan Pemasaran pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
13.	Kasi Lahan dan Irigasi pada Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	Anggota
14.	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	Anggota
15.	Kasi Penyuluhan dan Pembiayaan pada Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan	Anggota
16.	Kasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17.	Kasi Pengolahan, Pemasaran dan Pakan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18.	Kasi Perbibitan dan Produksi Ternak pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
21.	Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
22.	Kasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
23.	Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
24.	Kasi Perbenihan dan Perlindungan pada Bidang Tanaman Pangan	Anggota
25.	Kasi Produksi pada Bidang Tanaman Pangan	Anggota
26.	Kasi Pengolahan dan Pemasaran pada Bidang Tanaman Pangan	Anggota

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
BUPATEN KEBUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI
DAFTAR PENILAIAN RISIKO (DPR) DAN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

PADA

DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN
KAB. KEBUMEN TAHUN 2021

Nomor : 700/LHE/IP.IV/20.8/2020.

Tanggal : 29 Desember 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT

Jalan Arungbinang No. 16 Kebumen Telp. (0287) 381437, 381319 Fax (0287) 381319
Email: inspektoralakabkebumen@gmail.com Kode pos 54311

Nomor : 700/LHE/IP.IV/20.8/2020.
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Daftar Penilaian
Risiko (DPR) dan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten
Kebumen Pada Tahun 2021.

Kebumen, 29 Desember 2020

Kepada

Yth. Wakil Bupati Kebumen
di -

KEBUMEN

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Daftar Penilaian Risiko (DPR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2021.

1. Latar Belakang dan Dasar Pelaksanaan.

Latar belakang dari kegiatan evaluasi penerapan manajemen risiko di tingkat OPD yang dipandang strategis adalah adanya mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar setiap entitas melaksanakan pengendalian intern yang salah satunya dengan menjalankan manajemen risiko. Dengan seluruh entitas menerapkan manajemen risiko maka diharapkan pencapaian tujuan penting seperti yang telah tertuang dalam rencana strategis dapat segera terwujud. Inspektorat Kabupaten Kebumen yang memiliki fungsi sebagai third defense terhadap aspek akutabilitas pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi assurance dan konsultatif, dengan cara melaksanakan pendampingan dan pengawalan efektivitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

2. Maksud dan Tujuan.

Maksud diadakannya evaluasi penerapan manajemen risiko untuk menguji keandalan manajemen risiko yang telah dilaksanakan secara administratif formal dalam bentuk rencana tindak pengendalian (RTP).

Tujuan dilakukannya evaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk:

- a. Menilai keandalan manajemen risiko (RTP) yang dibuat oleh OPD.
- b. Meningkatkan tingkat maturitas sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah.
- c. Mengetahui risiko-risiko yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- d. Sebagai bahan perencanaan pengawasan tahunan bagi Inspektorat dengan penetapan program/kegiatan yang melekat pada OPD yang memiliki risiko tinggi dari hasil evaluasi.

3. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah.

Evaluasi penerapan manajemen risiko akan menghasilkan risiko-risiko hakiki yang mengganggu pada pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dilakukan direncanakan langkah-langkah yang tepat untuk menghilangkan penyebab timbulnya risiko.

4. Dampak Yang Timbul Dengan Tidak Dilakukannya Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.

Dampak negatif yang dapat timbul apabila tidak dilakukannya evaluasi manajemen risiko adalah tidak terdeteksinya risiko risiko yang paling hakiki yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Kebumen.

Evaluasi selain mengidentifikasi risiko yang hakiki juga dilakukan dengan menghitung ulang tingkat risiko yang telah dilakukan manajemen OPD sehingga menghasilkan tingkat risiko yang mendekati kebenaran. Setelah tingkat risiko dilakukan penilaian kembali, maka dilakukan penilaian ulang pada rencana tindak yang telah ditetapkan manajemen untuk merespon risiko yang timbul agar risiko dapat ditekan sampai kepada risiko yang dikehendaki manajemen OPD atau pemerintah daerah (*risk appetite*).

5. Hasil Evaluasi.

Evaluasi dilakukan terhadap identifikasi jenis risiko yang muncul pada sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam rencana tindak pengendalian (RTP) yang dibangun oleh manajemen OPD termasuk penetapan tingkat risiko, penyebab, dan rencana tindak yang ditetapkan, dengan hasil risiko paling hakiki sebagai berikut:

Sebelum evaluasi :

No.	Sub Kegiatan (Proses Bisnis)	Tindakan Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sebut	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah kelompok yang fasilitasi pengembangan / pengisian lumpung pangan masyarakat	Perkembangan lumpung pangan masyarakat tidak terlaksana	Perkembangan lumpung pangan masyarakat tidak terlaksana	Tidak terdapat cadangan pangan masyarakat	Melakukan Verifikasi CPCL	Menerima surat keterangan penyediaan lahan oleh Kepala Desa	2	3	6	Sedang
2	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Database Potensi Produk Pangan (NBM)	Data Neraca Bahan Makanan tidak tersusun tepat waktu	Data Neraca Bahan Makanan tidak tersusun tepat waktu	Analisa Neraca Bahan Makanan tidak dilaksanakan tepat waktu	Menggunakan Data Proxy	Membuat kesepakatan dengan OPD terkait	2	2	4	Rendah
3	Koordinasi Seleksi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen data arus bahan pangan	Data tidak tersedia tepat waktu	Data tidak tersedia tepat waktu	Hasil survey arus bahan pangan tidak tersedia tepat waktu	Tenaga survey dari penyuluh dan mitra BPS	Bekerjasama dengan BPS	2	2	4	Rendah
4	Perencanaan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen hasil dari pengumpulan dan pengolahan data laporan informasi pasokan, harga pangan dan akses pangan di daerah	Data tidak tersedia tepat waktu	Data tidak tersedia tepat waktu	Data laporan informasi pasokan, harga pangan dan akses pangan di daerah tidak tersedia tepat waktu	Tenaga pengumpul data dari penyuluh	Membuat SK penunjukan petugas pengumpul data serta koordinasi berkala	2	2	4	Rendah
5	Pengembangan Ketenangan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok yang dilaksanakan pemberdayaan lembaga distribusi pangan masyarakat (pengembangan, pembinaan)	pengetahuan bantuan stimulan tidak sesuai ketentuan	pengetahuan bantuan stimulan tidak sesuai ketentuan	tujuan pemberian bantuan stimulan tidak tercapai	Sosialisasi/pelatihan/pembinaan dan pendampingan	Monitoring dan evaluasi	2	3	6	Sedang
		Jumlah kelompok yang dilakukan pembinaan dan pendampingan dana talangan pengadaan pangan	Penggunaan dana talangan tidak sesuai dengan ketentuan	Penggunaan dana talangan tidak sesuai dengan ketentuan	Pengembalian pinjaman tidak tepat waktu	Sosialisasi/pelatihan/pembinaan dan pendampingan	Monitoring dan evaluasi	2	3	6	Sedang
		Jumlah kelompok yang melaksanakan padat karya pangan pembuatan jalan usaha tani	Ukuran CPCL kegiatan kurang valid	Ukuran CPCL kegiatan kurang valid	Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	Verifikasi ukuran CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan	Ukuran CPCL dan kecamatan dilengkapi form hasil verifikasi yang ditandatangani petugas penyuluh di kecamatan	1	2	2	Rendah
6	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling (GKG)	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan tidak sesuai dengan kebutuhan	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan tidak sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan cadangan pangan tidak sesuai dengan perencanaan	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan	Rapat Penyusunan Perbup	2	3	6	Sedang
			Pendistribusian cadangan pangan tidak sesuai dengan ketentuan	Pendistribusian cadangan pangan tidak sesuai dengan ketentuan	Pemanfaatan cadangan pangan tidak tepat sasaran	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan	Rapat Penyusunan Perbup	2	3	6	Sedang
			Ketidakefisienan dengan spesifikasi	Ketidakefisienan dengan spesifikasi	Cadangan pangan tidak tersedia tepat waktu	Penyusunan tim PHF yang Profesional	Pemeriksaan pekerjaan dan menyusun BA pemeriksaan	2	3	6	Sedang
			Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan	Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan	Cadangan pangan tidak tersedia tepat waktu	Monitoring kemampuan pekerjaan	Menyusun laporan kemampuan pekerjaan	2	3	6	Sedang
			Penurunan kualitas cadangan pangan	Penurunan kualitas cadangan pangan	Kurangnya kualitas cadangan pangan	Pengelolaan cadangan pangan	Pengamanan cadangan pangan secara berkala	3	2	6	Sedang
			Data cadangan pangan tidak tersedia	Data cadangan pangan tidak tersedia	Laporan stok cadangan pangan tidak akurat	Pencatatan keluar masuk cadangan pangan dilakukan secara rutin	Pemeriksaan stok dengan membandingkan dokumen pengeluaran dengan stok di gudang secara periodik	2	2	4	Rendah

No	Sub Kegiatan (Roses/Bandi)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
7	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Hama dan Penyakit Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pemberian stimulan percepatan pengendalian hama dan penyakit pangan	Kerbelanjutan kegiatan tidak maksimal	Kerbelanjutan kegiatan tidak maksimal	Kegiatan tidak berkelanjutan	Pembinaan dan Pendampingan secara intensif	Kunjungan ke kelompok	2	3	6	Sedang
			Pengadaan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	Pengadaan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	Barang tidak terpenuhi sesuai dengan waktu yang direncanakan	Menyusun Harga (Penilaian Sendiri) (HPS)	Mencari informasi/survei harga dan barang dilakukan lebih awal	2	2	4	Rendah
8	Koordinasi dan Sinergisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah kegiatan survey pola konsumsi pangan	Data tidak tersedia tepat waktu	Data tidak tersedia tepat waktu	Hasil survey pola konsumsi pangan tidak tersedia tepat waktu	Tenaga survey dari penyuluh dan mitra BPS	Bekerjasama dengan BPS	2	2	4	Rendah
9	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan	Data Penyusunan Peta tidak tersedia tepat waktu	Data Penyusunan Peta tidak tersedia tepat waktu	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tidak tersedia tepat waktu	Menggunakan Data Proxy	Membuat kesepakatan dengan OPD terkait	2	2	4	Rendah
10	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyusunan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan mandiri pangan	Ternak tidak berkembang baik dengan baik	Ternak tidak berkembang baik dengan baik	Kepagalan dalam penanganan kerawanan pangan	Pembinaan secara terus menerus	Kunjungan Langsung Ke Kelompok Penerimaanya	2	2	4	Rendah
11	Pengujian Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Masyarakat Kabupaten/ Kota	Higien sanitasi terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan tidak diperhatikan	Higien sanitasi terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan tidak diperhatikan	Pangan Segar Asal Tumbuhan belum ada in edamya	Sosialisasi dan Pembinaan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Melakukan penilaian higien sanitasi terhadap kelompok/pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang mendaftar registrasi	3	3	9	Tinggi
			Mutu dan keamanan pangan tidak diperhatikan	Mutu dan keamanan pangan tidak diperhatikan	Masih adanya produk pangan yang ditemukan masih mengandung bahan yang berbahaya	Pengawasan/ pemantauan dilakukan secara periodik	Koordinasi dan pemantauan bersama Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	2	2	4	Rendah
12	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	evaluasi pohon induk escape dan pohon induk cengkeh	belum bisa pendataan secara keseluruhan	belum bisa pendataan secara keseluruhan	belum bisa masuk database	penyederhanaan pendataan	koordinasi dg kecamatan	4	2	8	sedang
13	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi pembinaan tanaman pangan, Jumlah paket saprodi budidaya tanaman pangan,	belum maksimalnya penggunaan dan ketersediaan benih bersertifikat	belum maksimalnya penggunaan dan ketersediaan benih bersertifikat	kurang maksimalnya hasil produksi dan provitas tanaman pangan	meningkatkan pengetahuan, informasi dan kemampuan petani tentang benih bersertifikat	melakukan sosialisasi dan pembinaan oleh petugas BPSB	2	4	8	sedang
14	Pemeriksaan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah batang pengadaan bibit tanaman buah-buahan dan perkebunan	Semakin beragam jenis komoditas yang diusulkan	Semakin beragam jenis komoditas yang diusulkan	Pengadaan barang lebih kompleks permasalahan	Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diterima oleh kelompok pelaksana kegiatan	2	4	8	Sedang

No	Sub Kegiatan (Proses Bisnis)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sabotase	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
			Jadwal tanam mundur	Jadwal tanam mundur	Kurang maksimal waktu tanamnya	Mengupdate perkembangan data km dan koordinasi dengan BMKG	Menganalisa data km dan BMKG serta berkoordinasi dengan penyuluh agar kelompok tani memelihara tanaman terlebih dahulu sebelum menanam menunggu hujan turun	1	3	3	Rendah
		Jumlah Dendro Hortikultura	Benih/Bibit tidak tersedia baik kualitas maupun kuantitas	Benih/Bibit tidak tersedia baik kualitas maupun kuantitas	Dendro tidak terlaksana	Pendampingan lebih intensif dari PPL	Pembinaan dan kunjungan ke lokasi	2	2	4	Rendah
		Sarana dan Prasarana Dendro Hortikultura	Perbedaan Kualitas Dan Tembaku Kering Hasil Dendro, Pengaturan Lagi Kegiatan	Perbedaan Kualitas Dan Tembaku Kering Hasil Dendro, Pengaturan Lagi Kegiatan	Kurang Maksimalnya Kualitas Tembaku Kering	Pembinaan dan pendampingan lebih intensif oleh Penyuluh	Pembinaan dan kunjungan ke lokasi dendro	2	2	4	Rendah
		Sarana dan Prasarana pasca panen hortikultura dan perkebunan	dalam melakukan pengolahan pascapanen Petani produsen masih menggunakan peralatan dan mesin penanggungan pasca panen yang masih sederhana serta kurangnya kemampuan / pengetahuan pengolahan hasil kurang memperhatikan kualitas dan keamanan pangan	dalam melakukan pengolahan pascapanen Petani produsen masih menggunakan peralatan dan mesin penanggungan pasca panen yang masih sederhana serta kurangnya kemampuan / pengetahuan pengolahan hasil kurang memperhatikan kualitas dan keamanan pangan	Pangan dan bahan pangan asal hortikultura dan perkebunan belum memenuhi kebutuhan konsumen sesuai kualitas dan kuantitas terbatas	Sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus	koordinasi dengan penyuluh pertanian di BPP kecamatan	2	4	8	Sedang
		Jumlah panen dan promosi hasil produksi pertanian dan perkebunan yang diikuti	Tidak Terlaksananya Beberapa Kegiatan Promosi Luar dan Dalam Daerah	Tidak Terlaksananya Beberapa Kegiatan Promosi Luar dan Dalam Daerah	Komoditas unggulan tidak bisa dipromosikan	Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait	Memilih promosi yang memungkinkan dilaksanakan	2	2	4	Rendah
15	Penggiatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pangan Ternak Serta Petani Dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kelompok tani ternak yang dibina, Jumlah Timbangan Ternak yang Terpelihara, dan paket sarana dan prasarana pengolahan pakan	Peternak belum bisa menyediakan/ mengolah pakan yang berkualitas	Peternak belum bisa menyediakan/ mengolah pakan yang berkualitas	Ketersediaan pakan yang berkualitas belum mencukupi	Koordinasi dengan Pustkawan dan BPP setempat untuk monitoring dan evaluasi serta pendampingan kelompok	Monitoring dan evaluasi ke kelompok yang telah mendapatkan pembinaan/ pelatihan	2	3	6	Sedang
16	Penyusunan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah kartu ternak yang terimplementasi	Implementasi kartu ternak tidak tercapai	Implementasi kartu ternak tidak tercapai	Target Jumlah kartu ternak yang tercapai tidak tercapai	Menyederhanakan aplikasi dan mengoptimalkan petugas pencatat kartu ternak	Koordinasi dengan pembuat aplikasi, koordinasi dengan koordinator pustkawan untuk pendampingan petugas pencatat kartu ternak	3	3	9	Tinggi
17	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPPB) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (CPSB)	Luas demplot area tanaman jagung, Luas demplot area tanaman padi, Luas demplot area tanaman padi organik, Luas demplot area tanaman kedelai, Luas corporate farming, Jumlah kelompok yang dibantu benih padi, pelekhan dan pendampingan (Kuka Kecamatan)	Usulan CPCL kegiatan kurang valid	Usulan CPCL kegiatan kurang valid	Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	Verifikasi usulan CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan	Usulan CPCL dari kecamatan dilengkapi hardcopy yang diandatangani petugas di tingkat kecamatan	1	2	2	Rendah

No	Sub Kegiatan (Proses Bisnis)	Sasaran Sub Kegiatan	Penyediaan Paksi			Demana Tidak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Terdapat	Terdapat	Aktif	Upa Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
			Terdapat berbagai jenis komoditas maupun varietas yang diusahakan sesuai masa tanamnya	Terdapat berbagai jenis komoditas maupun varietas yang diusahakan sesuai masa tanamnya	Pengadaan barang lebih kompak pemasokannya a baik paket jumlah maupun waktu pengadaan barang	Penyediaan bahan jenis usutan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diaplikasikan pada kelompok petak-petakan kegiatan	2	4	8	Sedang
16	Koordinasi dan Seleksi/evaluasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Tersedianya Kegiatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)	Belum efektifnya penyediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani	Belum efektifnya penyediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani	Pemberian pupuk bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran, jumlah, jenis, waktu, dan mutu	Melakukan update data kebutuhan pupuk bersubsidi secara berkala	Melakukan koordinasi dengan petugas RDKK di tingkat Kecamatan	3	3	9	Tinggi
		Tersedianya Dokumen Data Alaman	Kesulitan untuk mengetahui jenis maupun jumlah alaman yang dibutuhkan petani	Kesulitan untuk mengetahui jenis maupun jumlah alaman yang dibutuhkan petani	Sebaran alaman tidak sesuai dengan kebutuhan petani	Menyusun data pemertanian alaman untuk mengetahui sebaran, jenis dan kondisi alaman	Melakukan koordinasi dengan PPL Kecamatan untuk melakukan pendataan	3	3	9	Tinggi
		Tersedianya Pengadaan Traktor Roda Dua, Pompa Air dan Alat Pita Panen Mendukung Corporate Farming	Pengadaan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	Pengadaan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	Alaman tidak terpenuhi sesuai dengan waktu yang direncanakan	Mencari informasi/survei harga dan barang dilakukan lebih awal	Melakukan koordinasi dengan penyedia yang tercantum dalam e-Catalog	2	3	6	Sedang
19	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (JIUT)	Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JIUT)	Air irigasi tidak sampai tik akhir meskipun JIUT sudah dibangun	Air irigasi tidak sampai tik akhir meskipun JIUT sudah dibangun	Tingkat produktivitas tidak tercapai	Evaluasi Pelaksanaan	Koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait	2	4	8	Sedang
20	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan JUT tidak dilaksanakan	Pembangunan JUT tidak dilaksanakan	Akhir kegiatan usaha tani tertambat	Perubahan lokasi dalam 1 Gapoktan	Konfirmasi dengan Gapoktan dan stakeholder kemungkinan perubahan lokasi dalam 1 Gapoktan	2	4	8	Sedang
21	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM/Panti	Jumlah Pembangunan Dampant	Limpahan air kor tidak tertampung karena Dampant tidak terbangun	Limpahan air kor tidak tertampung karena Dampant tidak terbangun	Tingkat produktivitas tidak tercapai	Evaluasi Pelaksanaan	Koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait	2	4	8	Sedang
22	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) yang terpelihara, Jumlah Dokumen DED RPH	Tidak jadi pemeliharaan bangunan dan tanah pemotongan serta pemeliharaan sumber air	Tidak jadi pemeliharaan bangunan dan tanah pemotongan serta pemeliharaan sumber air	Tidak ada perbaikan Sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan sehingga tetap kurang memadai	Penyusunan jadwal lebih awal dan dilaksanakan tepat waktu	Memperkirakan waktu musim hujan dan musim kemarau	-	-	-	-
23	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Salur Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Salur Penyuluh di Kecamatan dan Sarananya	Gedung sudah tidak layak dan membahayakan bila tetap dipakai	Gedung sudah tidak layak dan membahayakan bila tetap dipakai	Menghambat kegiatan penyuluhan bagi Gapoktan/Poktan	Koordinasi Dengan BPPEKA	Penganggaran untuk perbaikan gedung	2	2	4	Sedang
24	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan JCES, JAT	JCES adalah sebagai prasarana pengambilan air untuk disalurkan tersier dan Pembangunan JAT solusi kebutuhan air di musim kemarau	JCES adalah sebagai prasarana pengambilan air untuk disalurkan tersier dan Pembangunan JAT solusi kebutuhan air di musim kemarau	Tingkat produktivitas tidak tercapai	Evaluasi Pelaksanaan	-	-	-	-	-
		Jumlah pusat pembangunan, rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan dan perengkapannya DED	Tidak terbangunnya Pusat Kesehatan Hewan dan perengkapannya	Tidak terbangunnya Pusat Kesehatan Hewan dan perengkapannya	Pusat Kesehatan Hewan belum sesuai dengan standar	Koordinasi dengan BPKAD dan BPN lebih intensif, Penyusunan Action Plan harus direncanakan lebih matang	Bersurat kembali ke BPKAD dan BPN, Mengusulkan untuk penyusunan Action Plan	2	2	4	Sedang

No	Sub Kegiatan (Proses Utama)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opasi Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
25	Pelastaran dan Pemeliharaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pelaksanaan Kontes Ternak	Pelaksanaan Kontes ternak mundur	Pelaksanaan Kontes ternak mundur	Pelaksanaan Kontes Ternak tidak sesuai perencanaan	Perencanaan Pelaksanaan Kontes direvisi	Teknis Pelaksanaan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi khususnya bila masih pandemi	2	2	4	Rendah
		Jumlah ekor pengamanan bibit unggul ternak sapi	Pengujian bibit unggul Sapi PO tidak terkendali	Pengujian bibit unggul Sapi PO tidak terkendali	Berkurangnya ketersediaan bibit unggul Sapi PO	Pemberian bibit kepada kelompok	Pemberian bibit dan intensifikasi IB dengan straw Sapi PO Kebumen	3	3	9	Tinggi
		Jumlah kelompok yang dilaksanakan pembinaan kelompok perbibitan dan budidaya	Pemeliharaan ternak belum optimal atau sesuai pedoman	Pemeliharaan ternak belum optimal atau sesuai pedoman	Bibit ternak yang dipelihara belum sesuai spesifikasi sebagai bibit ternak	Pendampingan kepada kelompok perbibitan	Monitoring dan evaluasi ke kelompok perbibitan dan Pembinaan secara berkala	2	3	6	Sedang
		Jumlah kelompok ternak yang bisa menyedak/mengolah pakan yang berkualitas	Pelternak belum bisa menyedak/mengolah pakan yang berkualitas	Pelternak belum bisa menyedak/mengolah pakan yang berkualitas	Ketersediaan pakan yang berkualitas belum mencukupi	Koordinasi dengan Ruskeswan dan BPP setempat untuk monitoring dan evaluasi serta pendampingan kelompok	Monitoring dan evaluasi ke kelompok yang telah mendapatkan pembinaan/pelatihan	2	3	6	Sedang
		Pengadaan Bantuan Bibit Ternak dan Perlengkapannya	Bantuan bibit ternak dan perlengkapannya tidak tersedia tepat waktu	Bantuan bibit ternak dan perlengkapannya tidak tersedia tepat waktu	Distribusi bantuan bibit ternak dan perlengkapannya tidak tepat waktu	Koordinasi dengan pihak terkait lebih intensif, Pendampingan oleh petugas lapangan	Penemuan dengan pihak-pihak terkait, Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan KTT	2	3	6	Sedang
		Jumlah kegiatan identifikasi dan pembinaan kelembagaan	Budaya ternak tidak sesuai pedoman	Budaya ternak tidak sesuai pedoman	Ternak yang dipelihara perkembangannya belum optimal	Pendampingan kepada kelompok budidaya	Monitoring dan evaluasi ke kelompok budidaya dan Pembinaan secara berkala	2	3	6	Sedang
26	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengadaan obat-obatan ternak	Obat tidak tersedia saat dibutuhkan	Obat tidak tersedia saat dibutuhkan	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan tidak terlaksana dengan baik	Hanya pelayanan pasif serta	Pemantauan seoptimal mungkin dengan obat yang sudah ada	3	3	6	Sedang
		Penyelenggaraan Workshop kesehatan hewan	Materi yang disampaikan terbatas	Materi yang disampaikan terbatas	Pengawasan kefarmasian maupun update keilmuan petugas mengalami kendala sehingga pemeliharaan dan pencegahan penyakit tidak maksimal	Koordinasi dengan Dinas Sumber dan Lembaga dan instansi terkait	Pelatihan dan pertemuan rutin melalui seminar, workshop, lokakarya dan sharing antar petugas lebih intensif	2	3	6	Sedang
27	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel teses dan darah ternak dan sampel produk bahan asal hewan yang mendapatkan diagnosis veteriner, jumlah pendataan penyakit ternak	Uj lab terlunda atau tidak tepat waktu	Uj lab terlunda atau tidak tepat waktu	Kualitas bibit sapi PO Kebumen tidak terdeteksi penyakitnya, termasuk pengajuan Lembaga Sertifikasi Produk untuk sapi bibit terlunda	Pengiriman Petugas medis dan paramedis untuk melakukan pelatihan khusus di Balai Pelatihan Kesehatan Hewan Cragara Bogor dan Balai Pelatihan Peternakan Batu Malang	Usulan kepada Balai pelatihan kesehatan Hewan untuk pencatatan calon peserta dan mengusulkan pelatihan ke BKPPD	3	3	9	Tinggi
28	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Teraksarannya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPT) di tingkat kelompok tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen, Jumlah pengadaan stok obat-obatan tanaman pangan	pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman belum maksimal	pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman belum maksimal	mengurangi hasil produksi dan produktivitas tanaman pangan	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengendalian serangan OPT	pelatihan dan pendampingan SLPT di kelompok secara oleh PCPT	2	3	6	Sedang

No	Sub Kegiatan (Proses Bisnis)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terselenggaranya Petani dalam hal pembuatan pupuk organik	Ketidakefektifan petani terhadap pembuatan pupuk organik	Ketidakefektifan petani terhadap pembuatan pupuk organik	Petani tidak menggunakan pupuk organik	Peningkatan kunjungan lapangan PFT ke petani untuk menyerap aspirasi terkait kegiatan pertanian sebagai dasar penyusunan program Relahan Pembuatan Pupuk Organik	Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan kelompok tani di wilayahnya	2	4	8	Sedang
		Terselenggaranya program penyuluhan tingkat kecamatan dan program tingkat kabupaten	Kualitas Program Penyuluhan belum sesuai dengan pedoman	Kualitas Program Penyuluhan belum sesuai dengan pedoman	Program Penyuluhan yang tersusun belum menjadi acuan kegiatan penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan	Simak Penyusunan Program dan Pendampingan sesuai pedoman dengan narasumber dan Lembaga yang Kompeten	3	4	12	Tinggi
		Jumlah Tenaga Pendamping kegiatan pertanian	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian tidak optimal	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian tidak optimal	Target Kegiatan pertanian tidak tercapai	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan dan Kelembagaan Petani	Latihan, Kunjungan dan Supervisi baik untuk penyuluh atau petani	3	3	9	Tinggi
30	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok yang meningkat kualitas lembaga lainnya	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Target kelompok yang meningkat kualitas lembaga lainnya belum tercapai	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui arjansana penyuluh	Kunjungan (arjansana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	3	6	Sedang
		Jumlah kelompok yang terlayani pembinaan dan penilaian kelas kelompok	Hasil penilaian kelas kelompok kurang valid	Hasil penilaian kelas kelompok kurang valid	Kelas kelompok tidak selalu menunjukkan kemampuan/ kualitas kelompok	Melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator penilaian kelas kelompok	Koordinasi dengan Koordinator Jabatan Fungsional dan Koordinator Penyuluh terkait indikator penilaian	3	3	9	Tinggi
		Jumlah kegiatan pengelolaan agensi partisipatif dan terpadu	Kegiatan Sekolah Lapang belum optimal	Kegiatan Sekolah Lapang belum optimal	Kegiatan pengelolaan agensi partisipatif dan terpadu belum optimal	Koordinasi dengan instansi terkait dan optimisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan	Leleh intensif koordinasi dengan instansi terkait	2	3	6	Sedang
		Terlaksananya pembinaan kelompok penerima PMUK, PAK, dan PUA-P	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan modal secara bersama belum sesuai target	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui arjansana penyuluh	Kunjungan (arjansana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	3	6	Sedang
31	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (Laporan/Forum OPD)	Materi Forum PD tidak terinformasi dan validasi Renja PD kurang khususnya validasi lokasi program dan kegiatan	Materi Forum PD tidak terinformasi dan validasi Renja PD kurang khususnya validasi lokasi program dan kegiatan	Lokasi/Program dan Kegiatan pada Renja PD kurang valid	Koordinasi dan konsultasi melalui pertemuan dan melalui sosial media	Undangan dan materi disampaikan tepat waktu baik ke Peserta ataupun Narasumber	1	2	2	kecil
		Jumlah dokumen (Renja dan Renstra)	Materi Renja PD tidak terinformasikan dan Renja PD kurang valid	Materi Renja PD tidak terinformasikan dan Renja PD kurang valid	Renja PD tersusun Kurang Valid	Koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait serta koordinasi internal dengan bidang jada al penyusunan Renja PD	Penyampaian materi dan hasil Rapat Penyusunan Renja baik hard copy atau file melalui sosial media	1	2	2	kecil
			Materi Penyusunan Action Plan tidak terinformasikan dan Bahan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan kurang valid Kegiatan Penyusunan Action Plan tidak terlaksana	Materi Penyusunan Action Plan tidak terinformasikan dan Bahan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan kurang valid Kegiatan Penyusunan Action Plan tidak terlaksana	Action Plan Pengembangan Kawasan tidak tersusun	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik kabupaten, provinsi dan Pusat dan Koordinasi antar bidang Penerimaan rasionalisasi anggaran	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media kegiatan yang sudah dilakukan Penganggaran tahun berikutnya	1	2	2	kecil

No	Sub Kegiatan (Proses Dasar)	Sasaran Sub Kegiatan	Penyidikan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opel Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
			Materi Renc PD tidak terinformasikan dan Renc PD kurang valid kegiatan Penyusunan Renc PD tidak terlaksana	Materi Renc PD tidak terinformasikan dan Renc PD kurang valid kegiatan Penyusunan Renc PD tidak terlaksana	Renc PD tidak tersusun	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan kegiatan, dan koordinasi dengan bidang - bidang	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan penganggaran tahun berikutnya	1	2	2	sedang
		Jumlah Dokumen (RKA/RKAP, DPA/DPRA, KAK dan RKD)	Aturan yang berlaku dan baru dalam penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPRA tidak terlaksana	Aturan yang berlaku dan baru dalam penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPRA tidak terlaksana	RKA/RKAP dan DPA/DPRA tidak sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPRA dengan instansi terkait, dan koordinasi dengan bidang lebih intensif	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (LKJP, LKPD dan LRPD)	Bahan LKJP/LRPD tidak terkumpul secara lengkap	Bahan LKJP/LRPD tidak terkumpul secara lengkap	Penyusunan LKJP/LRPD tidak valid dan tepat waktu	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan LKJP/LRPD dengan instansi terkait, koordinasi dengan bidang lebih intensif	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah
			Bahan LKJP kurang lengkap dan terlambat terselesaikan/ tidak sesuai jadwal	Bahan LKJP kurang lengkap dan terlambat terselesaikan/ tidak sesuai jadwal	LKJP tersusun tidak valid dan tepat waktu	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan LKJP dengan instansi terkait, dan koordinasi dengan bidang - bidang secara intensif	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah
33	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rakor PORP K	Tidak adanya solusi pemecahan permasalahan sehingga target kinerja tidak tercapai	Tidak adanya solusi pemecahan permasalahan sehingga target kinerja tidak tercapai	Indikator Kinerja PD tidak tercapai	Koordinasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan rakorpop K	Undangan dan materi disampaikan sebelum rapat dan hasil Rakorpop baik hard copy atau file dalam melalui sosial media kepada Narasumber	1	2	2	sedang
		Jumlah dokumen capaian kinerja triwulan dan bulanan	Bahan Analisa data tidak lengkap	Bahan Analisa data tidak lengkap	Analisa data untuk perencanaan tahun berikutnya tidak lengkap	Koordinasi dengan bidang - bidang dan petugas di lapangan	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah
		Jumlah rapat (SRP dan penyusunan SOP)	Informasi terbaru tentang SRP tidak tersampaikan sehingga kelengkapan bahan SRP tidak tersedia	Informasi terbaru tentang SRP tidak tersampaikan sehingga kelengkapan bahan SRP tidak tersedia	SRP belum tersusun sesuai aturan yang berlaku dan tidak lengkap	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait jadwal Penyusunan SRP, dan koordinasi dengan bidang - bidang	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah
			Informasi terbaru tentang SOP tidak tersampaikan sehingga kelengkapan bahan SOP tidak tersedia	Informasi terbaru tentang SOP tidak tersampaikan sehingga kelengkapan bahan SOP tidak tersedia	SOP belum tersusun sesuai aturan yang berlaku dan tidak lengkap	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait Penyusunan SOP, dan koordinasi dengan bidang - bidang	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah
		Jumlah kegiatan pengumpulan, penyusunan dan sinkronisasi data statistik pertanian	Pengelolaan data dan informasi statistik pertanian belum efektif dan efisien	Pengelolaan data dan informasi statistik pertanian belum efektif dan efisien	Data dan informasi yang belum A3 (Accurate, Accessible, dan Accountible)	Sinkronisasi data statistik pertanian dan pelaporan data statistik pertanian secara berkala melalui aplikasi data statistik pertanian	Ceklis secara berkala, pengembangan aplikasi, penganggaran pengumpulan data	2	4	8	sedang

No.	Sub Kegiatan (Proses Bisnis)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sejati	Risiko	Aktual	Opel/Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
34	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terdapatnya Gaji Jumlah bulan tersedia kebutuhan Tamsil dan insentif ASN	Gaji dan Tunjangan tidak terbayarkan	Gaji dan Tunjangan tidak terbayarkan	Hak sebagai PNS tidak terpenuhi	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
35	Hak dan Penerimaan dan Pengawasan Verifikasi Keuangan TKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium tidak terbayarkan	Honorarium tidak terbayarkan	Perangungjawab pengelola keuangan tidak mendapat hasilnya	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
36	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak terpenuhi	Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
37	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan makan minum rapat tidak terpenuhi	Kebutuhan makan minum rapat tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
38	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak terpenuhi	Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tidak terpenuhi	Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
40	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan Alat tulis kantor tidak terpenuhi	Kebutuhan Alat tulis kantor tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
41	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi TKPD	Jumlah bulan penyediaan fasilitas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan Biaya perjalanan dinas luar daerah tidak terpenuhi	Kebutuhan Biaya perjalanan dinas luar daerah tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
42	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan kursi Jumlah pengadaan ember/stoples	Kebutuhan Biaya Pengadaan Mebel tidak terpenuhi	Kebutuhan Biaya Pengadaan Mebel tidak terpenuhi	Kebutuhan sarana / prasarana tidak terpenuhi	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
			Barang/pek yang diinginkan tidak terbeli	Barang/pek yang diinginkan tidak terbeli	Tidak terlaksananya kegiatan pengadaan mebel	Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan BPKAD	Memastikan ketersediaan barang di pasar/aplikasi	3	3	9	Tinggi
			Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	Barang tidak tersedia secara maksimal	Pengurus barang memastikan kebutuhan dengan benar	Membuat rekap RKBMD	3	3	9	Tinggi
43	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan kamera Jumlah pengadaan laptop/tablet Jumlah pengadaan printer	Kebutuhan Biaya Pengadaan Peralatan kantor tidak terpenuhi	Kebutuhan Biaya Pengadaan Peralatan kantor tidak terpenuhi	Kebutuhan sarana / prasarana kurang maksimal	Koordinasi dengan BAPFEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
			Barang/pek yang diinginkan tidak terbeli	Barang/pek yang diinginkan tidak terbeli	Tidak terlaksananya kegiatan pengadaan Peralatan kantor	Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan BPKAD	Memastikan ketersediaan barang di pasar/aplikasi	3	3	9	Tinggi
			Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	Barang tidak tersedia secara maksimal	Pengurus barang memastikan kebutuhan dengan benar	Membuat rekap RKBMD	3	3	9	Tinggi

No	Sub Kegiatan (Proses Baku)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
44	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan genset Jumlah pengadaan gardu Jumlah pengadaan jaringan distribusi tegangan Jumlah pengadaan plang kantor BPP Puskesmas Jumlah pengadaan taplak	Kebutuhan Biaya Pengadaan Perengkapan kantor tidak terpenuhi	Kebutuhan Biaya Pengadaan Perengkapan kantor tidak terpenuhi	Tidak terlaksananya kegiatan Pengadaan perengkapan gedung tidak cermat	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
			Barang/pek yang diinginkan tidak terbeli	Barang/pek yang diinginkan tidak terbeli	Tidak terlaksananya kegiatan Pengadaan perengkapan gedung kantor	Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan BPKAD	Memastikan ketersediaan barang di pasar/aplikasi	3	3	9	Tinggi
			Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	Barang tidak tersedia secara maksimal	Pengurus barang memastikan kebutuhan dengan benar	Membuat rekap RKBM	3	3	9	Tinggi
45	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak terpenuhi	Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
46	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak terpenuhi	Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
47	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak terpenuhi	Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terpenuhi	Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
49	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terpenuhi	Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
50	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor, BPP dan Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan rutin	Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terpenuhi	Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan / mengurangi kenyamanan tempat bekerja	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah
			Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terlaksana dengan baik	Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terlaksana dengan baik	menghambat kelancaran pekerjaan / mengurangi kenyamanan tempat bekerja	Memastikan kebutuhan rehab dengan tinjau lingkungan lokasi	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah

Setelah Evaluasi :

No	Sub Kegiatan (Proses Diker)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residu)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Guru	Tingkat Risiko
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Pembangunan Lumbung Pangan	Tidak tersedianya lahan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pembangunan lumbung pangan masyarakat	Pembangunan lumbung pangan masyarakat tidak terlaksana	Tidak terdapat cadangan pangan masyarakat	Melakukan Verifikasi CPCL	Menerima surat keterangan penyediaan lahan oleh Kepala Desa	3	3	9	Tinggi
2	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Database Potensi Produk Pangan (NBM)	Data tidak tersedia tepat waktu	Analisa Neraca Bahan Makanan tidak dilaksanakan	Data Neraca Bahan Makanan tidak tersusun	Menggunakan Data Proxy	Membuat kesepakatan dengan OPD terkait	2	3	6	Sedang
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen data arus bahan pangan	Kurangnya tenaga untuk melaksanakan survey	Hasil survey arus bahan pangan tidak tersedia	Data survey tidak tersedia tepat waktu	Tenaga survey dari penyuluh dan mitra BPS	Bekerjasama dengan BPS	2	3	6	Sedang
4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen hasil dari pengumpulan dan pengolahan data laporan informasi pasokan, harga pangan dan akses pangan di daerah	Kurangnya kemampuan untuk melaksanakan pengumpulan data	Pengumpulan dan pengolahan data tidak terlaksana	Data laporan informasi pasokan, harga pangan dan akses pangan di daerah tidak tersedia tepat waktu	Tenaga pengumpul data dari penyuluh	Membuat SK penunjukan petugas pengumpul data serta koordinasi berkala	2	3	6	Sedang
5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok yang dilaksanakan pemberdayaan lembaga distribusi pangan masyarakat (pembangunan, pengembangan, pembinaan)	Kurangnya kemampuan kelompok dalam mengelola bantuan hibah	pengelolaan bantuan stimulus tidak sesuai ketentuan	tujuan pemberian bantuan stimulus tidak tercapai	Pendampingan dengan Kelompok penerima bantuan	Monitoring dan evaluasi	3	3	9	Tinggi
		Jumlah kelompok yang dilakukan pembinaan dan pendampingan dana talangan pengadaan pangan	Kurangnya kemampuan kelompok dalam pengelolaan dana talangan	Penggunaan dana talangan tidak sesuai dengan ketentuan	Pengelolaan pinjaman tidak tepat waktu	Pendampingan dengan Kelompok penerima bantuan	Monitoring dan evaluasi	3	3	9	Tinggi
		Jumlah kelompok yang melaksanakan padat karya pangan pembuatan jalan usaha tani	Kelompok yang dilaksanakan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat	Pelaksanaan Padat Karya Pangan Pembuatan Jalan Usaha Tani menjadi tidak tepat waktu	Verifikasi usulan CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan	Usulan CPCL dari kecamatan dilengkapi form hasil verifikasi yang ditandatangani petugas penyuluh di kecamatan	3	3	9	Tinggi
6	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling (GKG)	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan tidak memperhatikan kondisi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat dan jumlah kebutuhan	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan tidak sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan cadangan pangan tidak sesuai dengan perencanaan	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan	Rapat Penyusunan Perbup	2	3	6	Sedang
			Belum adanya dasar pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan	Pendistribusian cadangan pangan tidak sesuai dengan ketentuan	Pemanfaatan cadangan pangan tidak tepat sasaran	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan	Rapat Penyusunan Perbup	2	3	6	Sedang
			Pelaksanaan tidak mempunyai barang sesuai dengan standar	Pendistribusian dengan spesifikasi	Cadangan pangan tidak tersedia tepat waktu	Penunjukan tim PPH yang Profesional	Pemeriksaan pekerjaan dan menyusun DA pemeriksaan	2	3	6	Sedang
			Penyediaan barang/jasa tidak disiplin	Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan	Cadangan pangan tidak tersedia tepat waktu	Monitoring kemampuan pekerjaan	Menyusun laporan kemampuan pekerjaan	2	3	6	Sedang

No	Sub Kegiatan (Proses Bisnis)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindakan Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
			Cadangan pangan berupa beras dan gabah mempunyai umur teknis pendek, penurunan kualitas gudang cadangan pangan	Penurunan kualitas cadangan pangan	Kurangnya kualitas cadangan pangan	Pengeksekuan cadangan pangan	Penggantian cadangan pangan secara berkala	3	2	6	Sedang
			Pencatatan keluar masuk cadangan pangan tidak dilakukan secara rutin	Data cadangan pangan tidak tersedia	Laporan stok cadangan pangan tidak akurat	Pencatatan keluar masuk cadangan pangan dilakukan secara rutin	Pemeriksaan stok dengan membandingkan dokumen pengaliran dengan stok di gudang secara periode	2	3	6	Sedang
7	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Regulasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pemberian stimulan percepatan penguatan regulasi pangan konsumsi pangan	Motivasi untuk melakukan kegiatan menurun	Keterlambatan kegiatan tidak maksimal	Kegiatan tidak berkelanjutan	Pembinaan dan Pendampingan secara intensif	Kunjungan ke kelompok	2	3	6	Sedang
			Barang yang tersedia tidak sesuai spesifikasi teknis	Pengadaan tidak sesuai dengan waku yang direncanakan	Barang tidak terpenuhi sesuai dengan waku yang direncanakan	Menyusun Harga Pokok Penjualan (HPP)	Mencari informasi/ survei harga dan barang dilakukan lebih awal	2	3	6	Sedang
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah kegiatan survey pola konsumsi pangan	Kurangnya tenaga untuk melaksanakan survey	Data analisis tidak tersedia tepat waku	Hasil survey pola konsumsi pangan tidak tersedia tepat waku	Tenaga survey dari penyuluh dan mitra BPS	Bekerjasama dengan BPS	2	3	6	Sedang
9	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Pola Ketahanan dan Kerawanan Pangan	Jumlah Dokumen Pola Ketahanan dan Kerawanan Pangan	Data tidak tersedia	Analisis Penyusunan Pola tidak dapat terlaksana	Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan tidak tersedia	Menggunakan Data Proxy	Membuat kesepakatan dengan OPD terkait	2	3	6	Sedang
10	Pelaksanaan Pengawasan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan mandiri pangan	Mutunya pengetahuan Budidaya ternak Peningkatan Hewan	Ternak tidak berkembang dengan baik	Kegiatan dalam penanganan kerawanan pangan	Pembinaan dan pendampingan secara terus menerus	Kunjungan langsung ke kelompok Peningkatannya oleh penyuluh/ petugas di kecamatan	2	3	6	Sedang
11	Penguatan Ketersediaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada produsen dan pedagang	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan 53/ 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Higien sanitasi terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan tidak diperhatikan	Pangan Segar Asal Tumbuhan belum ada (tidak ada)	Sosialisasi dan Pembinaan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Melakukan pelatihan hygiene sanitasi terhadap kelompok/pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang mendaftar registrasi	3	3	9	Tinggi
		Jumlah sampel pangan yang diperiksa pada pengawasan pangan	Pengawasan mutu dan keamanan pangan tidak dilaksanakan secara periodik	Mutu dan keamanan pangan tidak terawasi dan terpantau	Masih adanya produk pangan yang ditemukan mengandung bahan yang berbahaya	Pengawasan dilakukan secara periode	Koordinasi dan pemantauan bersama Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	2	3	6	Sedang
12	Penyamanan Kamuran dan Reforestasi SDG Hewan/Tanaman	Evaluasi pohon induk kelapa dan pohon induk cengkeh	Kurangnya tenaga pendataan pohon induk terpilih	Belum seluruhnya pohon induk terinventarisasi	Database pohon induk terpilih tidak tersedia	Koordinasi dengan kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan	Inventarisasi secara berkala	3	2	6	Sedang
13	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi/ pembinaan tanaman pangan, jumlah petani asosiasi budidaya tanaman pangan	Masih rendahnya pengetahuan dan informasi penggunaan benih bersertifikat	Belum maksimalnya penggunaan dan ketersediaan benih bersertifikat	Kurang maksimalnya hasil produksi dan provitas tanaman pangan	Meningkatkan pengetahuan, informasi dan kemampuan petani tentang benih bersertifikat	Melakukan sosialisasi dan pembinaan oleh petugas BPSU	2	3	6	Sedang

No.	Sub Kegiatan (Proses Bisnis)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residu)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
14	Pemeriksaan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah batang pengadaaan bibit tanaman buah buahan dan perkebunan	Kelompok sasaran terlalu banyak	Semakin beragam jenis komoditas yang diturunkan	Pengadaan barang lebih kompleks permasalahannya	Penyediaan sarana utama baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diterima oleh kelompok pelaksana kegiatan	3	3	9	Tinggi
			Musim hujan yang mundur	Jadwal tanam mundur	Kurang maksimal waktu tanamnya	Mengupdate perkembangan data iklim dan koordinasi dengan BMKG	Menganalisa data iklim dari BMKG serta berkoordinasi dengan penyuluh agar kelompok tani memelihara tanaman terlebih dahulu sebelum dilanang menunggu hujan turun	2	3	6	Sedang
		Jumlah Demplot Hortikultura	Belum ada pengalaman dalam persiapan dan waktunya lebih lama	Benih/bibit untuk pertanian tidak tersedia baik kualitas maupun kuantitas	Demplot tidak terlaksana	Pendampingan lebih intensif dari PPL	Pembinaan dan kunjungan ke lokasi	2	3	6	Sedang
		Sarana dan Prasarana Demplot Tembakau	Perbedaan waktu tanam di beberapa Kecamatan	Perbedaan Kualitas Dari Tembakau Kering Hasil Demplot	Kurang Maksimalnya Kualitas Tembakau Kering	Tanam secara serentak di lokasi demplot	Pembinaan dan kunjungan ke lokasi demplot	3	2	6	Sedang
		Sarana dan Prasarana pasca panen hortikultura dan perkebunan	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta penggunaan peralatan dan mesin penanganan pasca panen dan pengolahan terhadap pentingnya mutu dan keamanan pangan	dalam melakukan pengolahan pascapanen. Petani produsen masih menggunakan peralatan dan mesin penanganan pasca panen yang masih sederhana serta kurangnya kemampuan / pengetahuan pengolahan hasil kurang memperhatikan kualitas dan keamanan pangan	Pangan dan bahan pangan asal hortikultura dan perkebunan belum memenuhi kebutuhan konsumen sesuai kualitas dan kuantitas terbatas	Sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus	koordinasi dengan penyuluh pertanian di BPP kecamatan	3	2	6	Sedang
		Jumlah pameran dan promosi hasil produksi pertanian dan perkebunan yang diikuti	Tidak ada event promosi produksi pertanian dan perkebunan	Tidak Terlaksanainya Beberapa Kegiatan Promosi Luar dan Dalam Daerah	Komoditas unggulan tidak bisa dipromosikan	Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait	Memilih promosi yang memungkinkan dilaksanakan	2	3	6	Sedang
15	Peningkatan Mutu dan Penedaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kelompok ternak ternak yang dibina, Jumlah Timbangan Ternak yang Terpelihara, dan paket sarana dan prasarana pengolahan pakan	Sarana pembuat pakan belum memadai. Budaya/Kebiasaan peternak masih menggunakan alat tradisional. Penyuluhan kurang optimal.	Peternak belum bisa menyediakan/ mengolah pakan yang berkualitas	Ketersediaan pakan yang berkualitas belum mencukupi	Koordinasi dengan Puskesw an dan BPP setempat untuk monitoring dan evaluasi serta pendampingan kelompok	Monitoring dan evaluasi ke kelompok yang telah mendapatkan pembinaan/ pelatihan	2	3	6	Sedang
16	Pengamanan Penedaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah kartu ternak yang terimplementasi	Aplikasi terblokir. Petugas pencatat kartu ternak desa belum optimal	Implementasi kartu ternak tidak tercapai	TARGET Jumlah kartu ternak yang tercatat tidak tercapai	Menyederhanakan aplikasi dan mengoptimalkan petugas pencatat kartu ternak	Koordinasi dengan pembuat aplikasi, koordinasi dengan Koordinator puskesmas untuk pendampingan petugas pencatat kartu ternak	3	3	9	Tinggi

No	Sub Kegiatan (Kromas Baris)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Rencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
17	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B)	Luas demplot area tanaman jagung, Luas demplot area tanaman padi, Luas demplot rintonan padi organik, Luas demplot area tanaman kedelai, Luas corporate farming, Jumlah kelompok yang dibantu benih padi, pelatihan dan pendampingan (Kuota Kecamatan)	Data usulan CPCL yaitu kelompok pelaksana kegiatan kurang update sehingga tidak sesuai kondisi di lapangan	Usulan CPCL kegiatan kurang valid	Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	Verifikasi usulan CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan	Usulan CPCL dan keamanan dilengkapi hardcopy yang distandartkan petugas di tingkat kecamatan	2	3	6	Sedang
			Banyaknya kelompok sasaran kegiatan	Semakin beragam jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan sesuai masa tanamnya	Pengadaan barang lebih kompleks permasalahannya baik paket jumlah maupun terkait waktu pengadaan barang	Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diaplikasikan pada kelompok pelaksana kegiatan	2	3	6	Sedang
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Tertaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)	Data kebutuhan pupuk bersubsidi yang terluang dalam RDKK belum sesuai dengan kondisi di lapangan	Belum efektifnya penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani	Pemberian pupuk bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran, jumlah, jenis, waktu, dan mutu	Melakukan updating data kebutuhan pupuk bersubsidi secara berkala	Melakukan koordinasi dengan petugas RDKK di tingkat Kecamatan	3	3	9	Tinggi
		Tersedianya Dokumen Data Alaman	Data alaman belum terdokumentasi dengan baik	Kesulitan untuk mengetahui jenis maupun jumlah alaman yang dibutuhkan petani	Sebaran alaman tidak sesuai dengan kebutuhan petani	Menyusun data pemanfaatan alaman untuk mengetahui sebaran, jenis dan kondisi alaman	Melakukan koordinasi dengan PPL Kecamatan untuk melakukan pendataan	3	3	9	Tinggi
		Tertaksananya Pengadaan Traktor Rode Dua, Pompa Air dan Alat Peralatan Mendukung Corporate Farming	Spesifikasi teknis barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	Alaman tidak terpenuhi sesuai dengan waktu yang direncanakan	Mencari informasi/survei harga dan barang dilakukan lebih awal	Melakukan koordinasi dengan penyedia yang tercantum dalam e-Catalog	2	3	6	Sedang
19	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Belum sinkron implementasi kewenangan pengelolaan irigasi oleh Dinas Pertanian dan Dinas PUPR	Air irigasi tidak sampai titik akhir meskipun JITUT sudah dibangun	Tingkat produktivitas tidak tercapai	Evaluasi Pelaksanaan	Koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait	2	4	8	Sedang
20	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Usulan JUT tidak sesuai dengan spesifikasi teknis JUT (Poros Desa belum ada embrio, tanggul inspeksi)	Pembangunan JUT tidak dilaksanakan	Akses kegiatan usaha tani terhambat	Perubahan lokasi dalam 1 Gapoktan	Konfirmasi dengan Gapoktan dan stakeholder kemungkinan perubahan lokasi dalam 1 Gapoktan	3	4	12	Tinggi
21	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Panti	Jumlah Pembangunan Dampart	Belum sinkron implementasi kewenangan pengelolaan irigasi oleh Dinas Pertanian dan Dinas PUPR	Limpahan air air tidak tertampung karena Dampart tidak terbangun	Tingkat produktivitas tidak tercapai	Evaluasi Pelaksanaan	Koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait	2	4	8	Sedang
22	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) yang terpelihara, Jumlah Dokumen DED RPH	Penyusunan jadwal penyedia tidak tepat waktu	Tidak jadi pemeliharaan bangunan dan lantai pemrosesan serta pemeliharaan sumber air	Tidak ada perbaikan Sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan sehingga tetap kurang memadai	Penyusunan jadwal lebih awal dan dilaksanakan tepat waktu	Memperkirakan waktu musim hujan dan musim kemarau	2	4	8	Sedang

No	Sub Kegiatan (Proses Bisnis)	Sasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Pencana Tindakan Pengendalian		Tingkat Risiko (Rendah)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opis Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Pemung-kan	Dam-pak	Skor	Tingkat Risiko
23	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan Kesehatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarananya	Harapanya Gedung BPP yang harus dibuat kebutuhan sarana dan prasarannya	Gedung masih tidak layak dan membutuhkan bisa tetap dipakai	Menghambal kegiatan penyuluhan bagi Gapoktan (Porkan)	Koordinasi Dengan BPYEDA	Penganggaran untuk perbaikan gedung	2	4	8	Sedang
24	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peternakan Lainnya	Jumlah Pembangunan JERS dan JAT	JERS dan JAT tidak terlaksana	Tidak terakannya ar untuk pertanian sesuai kebutuhan (JERS adalah sebagai prasarana pengambian ar untuk diartikan terak dari Pembangunan JAT akan kebutuhan ar di rumah terak)	Tingkat produktivitas tidak terak	Pembangunan JERS dan JAT tepat waktu	Koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif	2	4	8	Sedang
		Jumlah paket pembangunan, rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan dan perlengkapan PUSKES Hewan	Akron dan lokasi Pusat Kesehatan Hewan belum tersedia secara menyeluruh, Tanah cak lokasi Pusat Kesehatan Hewan belum bersertifikat	Tidak teraknya Pusat Kesehatan Hewan dan perlengkapannya	Pusat kesehatan Hewan belum sesuai dengan standar	Koordinasi dengan BPKAD dan BPH lebih intensif, Penyusunan Action Plan harus direncanakan lebih matang	Berturut kembali ke BPKAD dan BPH, Mengajukan untuk penyusunan Action Plan	3	3	9	Tinggi
25	Pelestarian dan Pemertanian Wilayah Sumber Babi Ternak dan Rumpun/Galut Ternak	Pelaksanaan Kontas Ternak	Karena masih Pandas	Pelaksanaan Kontas ternak mundur	Pelaksanaan Kontas Ternak tidak sesuai perencanaan	Perencanaan Pelaksanaan Kontas Ternak evaluasi	Teknis Pelaksanaan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi khususnya bila masih pandemi	2	3	6	Sedang
		Jumlah ekor pengambian babi unggul ternak sapi	Ketersediaan Peternak untuk memperkembangkan bibit unggul sapi PO masih kurang (karena kebutuhan)	Perkembangan bibit unggul sapi PO tidak terak	Berkurangnya ketersediaan bibit unggul sapi PO	Pemberian bibit kepada kelompok	Pemberian bibit dan intensifikasi ID dengan stih sapi PO ketumun	3	3	9	Tinggi
		Jumlah kelompok yang dilaksanakan pembinaan kelompok terhadap kelompok perbibitan dan budidaya	Kurangnya pemahaman kelompok terhadap kelompok perbibitan	Pemertanian ternak belum optimal atau sesuai pedoman	Bibit ternak yang dipelihara belum sesuai spesifikasi sebagai bibit ternak	Pendampingan kepada kelompok perbibitan	Monitoring dan evaluasi ke kelompok perbibitan dan Pembinaan secara berkala	2	3	6	Sedang
		Jumlah kelompok ternak ternak yang dibina, Jumlah unit budidaya pakan yang terak, dan Jumlah paket sarana dan prasarana pengolahan pakan	Sarana pembuat pakan belum memadai, Budidaya pakan ternak masih menggunakan alat tradisional, Penyuluhan kurang optimal	Peternak belum bisa menyediakan' mengolah pakan yang berkualitas	Ketersediaan pakan yang berkualitas belum mencukupi	Koordinasi dengan Puskesmas dan BPH setempat untuk monitoring dan evaluasi serta pendampingan kelompok	Monitoring dan evaluasi ke kelompok yang telah mendapatkan pembinaan' pelatihan	2	3	6	Sedang
		Pengadaan Sarana Bibit Ternak dan Perlengkapannya	Penyusunan jadwal penyedia tidak tepat waktu, KTT penerima belum mengadkan sarana yang diperlukan	Bantuan bibit ternak dan perlengkapannya tidak tersedia tepat waktu	Distribusi bantuan bibit ternak dan perlengkapannya tidak tepat waktu	Koordinasi dengan pihak terkait lebih intensif, Pendampingan oleh petugas lapangan	Penemuan dengan pihak terkait, Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan KTT	2	3	6	Sedang
		Jumlah kegiatan difasilitasi dan pembinaan kelompok terhadap budidaya ternak	Kurangnya pemahaman kelompok terhadap budidaya ternak	Budidaya ternak tidak sesuai pedoman	Ternak yang dipelihara perkembangannya belum optimal	Pendampingan kepada kelompok budidaya	Monitoring dan evaluasi ke kelompok budidaya dan Pembinaan secara berkala	2	3	6	Sedang
26	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengadaan obat-obatan ternak	Pengadaan tidak tepat waktu	Obat tidak tersedia saat dibutuhkan	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan tidak terak dengan baik	Hanya pelayanan pasif servis	Pemeriksaan kepatuhan mungkin dengan obat yang sudah ada	2	3	6	Sedang
		Penyelenggaraan Workshop kesehatan hewan	Kehadiran narasumber yang kompeten terbatas	Material yang disampaikan terbatas	Pengawasan ketrampan narasumber update keilmuan petugas mengalami kendala sehingga pembinaan dan pencegahan penyakit tidak merata	Koordinasi dengan Narasumber dan Lembaga dan instansi terkait	Pelatihan dan pertemuan rutin melalui seminar, workshop, lokakarya dan sharing antar petugas lebih intensif	2	3	6	Sedang

No	Sub Kegiatan (Program/Bidang)	Gasaran Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko			Mencana Tindak Pengendalian		Status Risiko (Residual)			
			Sebab	Risiko	Akibat	Opti Strategi Pengendalian	Langkah Pengendalian	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat Risiko
27	Pembiakan Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel feses dan darah ternak dan sampel produk bahan asal hewan yang mendapatkan diagnosis veteriner, jumlah pendataan penyakit ternak	Ketidaktahuan media dan parameter belum terampil dalam pengambilan sampel, baik sampel darah maupun jenis sampel lainnya	Upat tertunda atau tidak tepat waktu	Kualitas bibit sapi PO Kebumen tidak terdeteksi penyakitnya, termasuk pengajuan Lembaga Sertifikasi Produk untuk sapi bibit tertunda	Pengiriman Petugas media dan parameter untuk melakukan pelatihan khusus di Balai Pelatihan Kesehatan Hewan Cragara Bogor dan Balai Pelatihan Peternakan Batu Malang	Urutan kepada Balai pelatihan kesehatan Hewan untuk pencatatan calon peserta dan mengusulkan pelatihan ke BKPHD	3	3	9	Tinggi
28	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di tingkat kelompok tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen; Jumlah pengadaan stok obat-obatan tanaman pangan	masih rendahnya ilmu pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengendalian OPT	pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman belum maksimal	mengurangi hasil produksi dan produktivitas tanaman pangan	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengendalian serangan OPT	pelatihan dan pendampingan SLPHT di kelompok secara oleh POPT	2	3	6	Sedang
29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Petani dalam hal pembuatan pupuk organik	Penyuluhan PPL kurang optimal	Ketidakterpaparan petani terhadap pembuatan pupuk organik	Petani tidak menggunakan pupuk organik	Peningkatan kunjungan lapangan PPL ke petani untuk menyerap aspirasi terkait kegiatan pertanian sebagai dasar penyusunan program Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Peningkatan koordinasi dan komunikasi petugas dengan kelompok tani di wilayahnya	2	4	8	Sedang
		Terlaksananya program penyuluhan tingkat kecamatan dan program tingkat kabupaten	Data tidak valid dan proses penyusunan program penyuluhan belum sesuai pedoman	Kualitas Program Penyuluhan belum sesuai dengan pedoman	Program Penyuluhan yang tersusun belum menjadi acuan kegiatan penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Penyuluhan	Berkes Penyusunan Program dan Pendampingan sesuai pedoman dengan narasumber dari Lembaga yang Kompeten	3	4	12	Tinggi
		Jumlah Tenaga Pendamping kegiatan pertanian	Kekurangan tenaga penyuluh karena Pensiun	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian tidak optimal	Tarief Kegiatan pertanian tidak tercapai	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Petani	Latihan, Kunjungan dan Supervisi baik untuk penyuluh atau petani	3	3	9	Tinggi
30	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok yang meningkat kualitas lembaga lainnya	Kapasitas pengurus belum memadai	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Tarief kelompok yang meningkat kualitas lembaga lainnya belum tercapai	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui anggarana penyuluh	Kurungan (anggarana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	3	6	Sedang
		Jumlah kelompok yang terlayani pembinaan dan penilaian kelas kelompok	Indikator penilaian kelas kelompok tidak konsisten menunjukkan performa kelompok	Hasil penilaian kelas kelompok kurang valid	Kelas kelompok tidak selalu menunjukkan kemampuan/kualitas kelompok	Melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator penilaian kelas kelompok	Koordinasi dengan Koordinator Jabatan Fungsional dan Koordinator Penyuluh terkait indikator penilaian	3	3	9	Tinggi
		Jumlah kegiatan pengelolaan ngasi partisipatif dan terpadu	Pembangunan Fiskal ngasi belum dilaksanakan	Kegiatan Sekolah Lapangan belum optimal	Kegiatan pengelolaan ngasi partisipatif dan terpadu belum optimal	Koordinasi dengan instansi terkait dan optimisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan	Lebih intensif koordinasi dengan instansi terkait	2	3	6	Sedang
		Terlaksananya pembinaan kelompok penerima PMUK, PKK, dan PUAP	Kapasitas pengurus belum memadai	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan modal secara bersama belum sesuai target	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui anggarana penyuluh	Kunjungan (anggarana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	3	6	Sedang

Kertas kerja sebelum sesudah evaluasi secara rinci terdapat pada lampiran.

Demikian kami sampaikan laporan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko, agar digunakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

1. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT

Jalan Arungmasang No. 16 Kebumen Telp. (0287)381437, 381319 Fax (0287)381319
Email: inspektorkabupatenkebumen@gmail.com Kode pos 54311

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
HASIL EVALUASI DAFTAR PENILAIAN RISIKO (DPR)
DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021**

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (14-12-2020), bertempat di Inspektorat Kabupaten Kebumen, kami :

1. Nama : **Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI**
NIP : 19641015 198903 2 006
Jabatan : Inspektur Kabupaten Kebumen.

Sebagai "**Pihak Pertama**"

2. Nama : **Ir. H. TRI HARYONO**
NIP : 19620111 198603 1 018
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kebumen.

Sebagai "**Pihak Kedua**"

Telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil Evaluasi Daftar Penilaian Risiko (DPR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Evaluasi Daftar Penilaian Risiko (DPR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen diperoleh simpulan bahwa dokumen Daftar Penilaian Risiko yang telah disusun dan dikirim sudah sesuai dengan subkegiatan nomenklatur yang barudan telah memuat semua subkegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas yaitu terdiri atas 29 subkegiatan. Atas Daftar Penilaian Risiko tersebut telah dilakukan koreksi terhadap 29 subkegiatan tersebut.

Terhadap permasalahan diatas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen untuk:

1. Segera melakukan penyesuaian Daftar Penilaian Risiko terhadap subkegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas.

2. Secara berkala Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen harus melakukan pemantauan dan pembaruan dengan melakukan evaluasi internal atas pernyataan risiko, penilaian risiko dan penilaian efektivitas rencana tindak pengendalian, agar efektivitas penerapan manajemen risiko dapat terjamin.

Kedua belah pihak telah sepakat terhadap hasil Evaluasi Daftar Penilaian Risiko (DPR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Pihak Kedua akan melaksanakan rekomendasi seperti pada resume hasil audit terlampir dalam waktu paling lama 60 hari kerja.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Inspektur Kabupaten Kebumen



Dra. H. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kebumen



Ir. H. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620111 198603 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT

LAMPIRAN

DAFTAR PENILAIAN RISIKO SEBELUM EVALUASI

LAPORAN HASIL EVALUASI
DAFTAR PENILAIAN RISIKO (DPR) DAN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PADA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

REKAPITULASI ANALISIS RESIKO
SUB KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
							SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.01.01			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN																			
2		2.01.01			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	09	2.01.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																			
2	09	2.01.01	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN																			
2	09	2.01.01	02	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
2	09	2.01.01	02	2.01	03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Kelompok yang fasilitasi pengembangan / pengisian lumbung pangan masyarakat	Tidak tersedianya lahan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pembangunan lumbung pangan masyarakat	R1	Pembangunan lumbung pangan masyarakat tidak terlaksana	Tidak tersedia cadangan pangan masyarakat	C	Menyusun dan menyampaikan kriteria/spesifikasi persyaratan pembangunan lumbung pangan masyarakat	4	4	16	Sangat Tinggi	Melakukan Verifikasi CPCL	Meminta surat keterangan penyediaan lahan oleh Kepala Desa	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
2	09	2.01.01	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																			
2	09	2.01.01	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																			
2	09	2.01.01	03	2.01	01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Database Potensi Produk Pangan (NBM)	Data tidak tersedia tepat waktu	R1	Data Neraca Bahan Makanan tidak tersusun tepat waktu	Analisa Neraca Bahan Makanan tidak dilaksanakan tepat waktu	C	Koordinasi dengan OPD terkait	3	3	9	Tinggi	Menggunakan Data Proxy	Membuat kesepakatan dengan OPD terkait	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun
2	09	2.01.01	03	2.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen data arus bahan pangan	Kurangnya tenaga untuk melaksanakan survey	R1	Data tidak tersedia tepat waktu	Hasil survey arus bahan pangan tidak tersedia tepat waktu	C	Koordinasi dengan BPS	3	3	9	Tinggi	Tenaga survey dari penyuluh dan mitra BPS	Bekerjasama dengan BPS	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun
2	09	2.01.01	03	2.01	04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen hasil dari pengumpulan dan pengolahan data laporan informasi pasokan, harga pangan dan akses pangan di daerah	Kurangnya tenaga untuk melaksanakan pengumpulan data	R1	Data tidak tersedia tepat waktu	Data laporan informasi pasokan, harga pangan dan akses pangan di daerah tidak tersedia tepat waktu	C	Koordinasi Koordinator Penyuluh Pertanian	3	3	9	Tinggi	Tenaga pengumpul data dari penyuluh	Membuat SK penunjukan petugas pengumpul data serta koordinasi berkala	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun
2	09	2.01.01	03	2.01	05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok yang dilaksanakan pemberdayaan lembaga distribusi pangan masyarakat (pembangunan, pengembangan, pembinaan)	Kurangnya kemampuan kelompok dalam mengelola bantuan hibah	R1	pengelolaan bantuan stimulan tidak sesuai ketentuan	tujuan pemberian bantuan stimulan tidak tercapai	C	Pembinaan Gapoktan/Poktan penerima bantuan stimulan	4	4	16	Sangat Tinggi	Sosialisasi/pelatihan/pembinaan dan pendampingan	Monitoring dan evaluasi	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
						Jumlah kelompok yang dilakukan pembinaan dan pendampingan dana talangan pengadaaan pangan	Kurangnya kemampuan kelompok dalam pengelolaan dana talangan	R1	Penggunaan dana talangan tidak sesuai dengan ketentuan	Pengembalian pinjaman tidak tepat waktu	C	Pembinaan kelompok penerima dana talangan	4	4	16	Sangat Tinggi	Sosialisasi/pelatihan/pembinaan dan pendampingan	Monitoring dan evaluasi	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
						Jumlah kelompok yang melaksanakan padat karya pangan pembuatan jalan usaha tani	Kelompok/gapoktan yang diusulkan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan	R1	Usulan CPCL kegiatan kurang valid	Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	C	Penyusunan form verifikasi yang lengkap dan jelas, Verifikasi usulan CPCL secara bertahap mulai dari petugas penyuluh lapangan hingga petugas verifikasi kabupaten	2	4	8	Sedang	Verifikasi usulan CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan	Usulan CPCL dari kecamatan dilengkapi form hasil verifikasi yang ditandatangani petugas penyuluh di kecamatan	1	2	2	Rendah	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
2	09	2.01.01	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota																			
2	09	2.01.01	03	2.02	03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling (GKG)	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan tidak memperhatikan kondisi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat dan jumlah kebutuhan	R 1	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan tidak sesuai dengan kebutuhan	Pengadaan cadangan pangan tidak sesuai dengan perencanaan	C	Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan dengan mempertimbangkan potensi produksi, prioritas sasaran, kondisi konsumsi, periode waktu kebutuhan pangan, resiko penurunan kualitas	3	4	12	Tinggi	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan	Rapat Penyusunan Perbup	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran

NOMOR					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
							SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Belum adanya dasar pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan	R 2	Pendistribusian cadangan pangan tidak sesuai dengan ketentuan	Pemanfaatan cadangan pangan tidak tepat sasaran	C	Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012 ttg pangan ttg pemanfaatan cadangan pangan yang harus ditindaklanjuti dengan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota ttg pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	3	3	9	Tinggi	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan	Rapat Penyusunan Perbup	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
							Rekanan tidak mempunyai barang sesuai dengan standar	R 3	Ketidaksesuaian dengan spesifikasi	Cadangan pangan tidak tersedia tepat waktu	C	Pemeriksaan pekerjaan	3	3	9	Tinggi	Penunjukan tim PHPP yang Profesional	Pemeriksaan pekerjaan dan menyusun BA pemeriksaan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
							Penyedia barang/jasa tidak disiplin	R 4	Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan	Cadangan pangan tidak tersedia tepat waktu	C	Membuat Sanksi Keterlambatan	3	3	9	Tinggi	Monitoring kemajuan pekerjaan	Menyusun laporan kemajuan pekerjaan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
							Cadangan pangan berupa beras dan gabah mempunyai umur teknis pendek, penurunan kualitas gudang cadangan pangan	R 5	Penurunan kualitas cadangan pangan	Kurangnya kualitas cadangan pangan	C	Pemeliharaan	4	3	12	Tinggi	Pengelolaan cadangan pangan	Penggantian cadangan pangan secara berkala	3	2	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
							Pencatatan keluar masuk cadangan pangan tidak dilakukan secara rutin	R6	Data cadangan pangan tidak tersedia	Laporan stok cadangan pangan tidak akurat	C	Penyaluran bantuan cadangan pangan dilengkapi berita acara penyerahan bantuan	3	3	9	Tinggi	Pencatatan keluar masuk cadangan pangan dilakukan secara rutin	Pemeriksaan stok dengan membandingkan dokumen pengeluaran dengan stok di gudang secara periodik	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
2	09	2.01.01	03	2.04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																	
2	09	2.01.01	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pemberian stimulan percepatan penganeka ragam konsumsi pangan	R 1	Kerbelanjutan kegiatan tidak maksimal	Kegiatan tidak berkelanjutan	C	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan	3	3	9	Tinggi	Pembinaan dan Pendampingan secara intensif	Kunjungan ke kelompok	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahan Pangan	1 Tahun Anggaran
							Barang yang tersedia tidak sesuai spesifik teknis	R2	Pengadaan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	Barang tidak terpenuhi sesuai dengan waktu yang direncanakan	C	Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan perencanaan	3	2	6	Sedang	Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Mencari informasi/survei harga dan barang dilakukan lebih awal	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Ketahan Pangan	1 Tahun Anggaran
2	09	2.01.01	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah kegiatan survey pola konsumsi pangan	R1	Data tidak tersedia tepat waktu	Hasil survey pola konsumsi pangan tidak tersedia tepat waktu	C	Koordinasi dengan BPS	3	3	9	Tinggi	Tenaga survey dari penyuluh dan mitra BPS	Bekerjasama dengan BPS	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun
2	09	2.01.01	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																		
2	09	2.01.01	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan																		
2	09	2.01.01	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan	R1	Data Penyusunan Peta tidak tersedia tepat waktu	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tidak tersedia tepat waktu	C	Koordinasi dengan OPD terkait	3	3	9	Tinggi	Menggunakan Data Proxy	Membuat kesepakatan dengan OPD terkait	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun
2	09	2.01.01	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota																		
2	09	2.01.01	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan mandiri pangan	R1	Ternak tidak berkembangbiak dengan baik	Kegagalan dalam penanganan kerawanan pangan	C	Memberikan Sosialisasi dan Pelatihan kepada Calon Penerima Hibah	3	3	9	Tinggi	Pembinaan secara terus menerus	Kunjungan Langsung Ke Kelompok Penerimaannya	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
2	09	2.01.01	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																		
2	09	2.01.01	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota																		

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	09	2.01.01	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Masyarakat Kabupaten Kebumen	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Permentan 53/ 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	R1	Higiene sanitasi terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan tidak diperhatikan	Pangan Segar Asal Tumbuhan belum ada jin edarnya	C	Sosialisasi dan Pembinaan	3	4	12	Tinggi	Sosialisasi dan Pembinaan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Melakukan penilaian higiene sanitasi terhadap kelompok/pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang mendaftar registrasi	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
								Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi	R2	Mutu dan keamanan pangan tidak diperhatikan	Masih adanya produk pangan yang ditemukan masih mengandung bahan yang berbahaya	C	Pemantauan dan pengambilan sampel secara berkala untuk di uji baik pangan segar maupun pangan olahan di pasar tradisional maupun pasar modern/ swalayan di wilayah Kabupaten Kebumen	3	3	9	Tinggi	Pengawasan/ pemantauan dilakukan secara periodik	Koordinasi dan pemantauan bersama Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
3		2.01.01				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	27	2.01.01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
3	27	2.01.01	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																			
3	27	2.01.01	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota																			
3	27	2.01.01	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	evaluasi pohoninduk kelapa dan pohon induk cengkeh	belum semuanya pohon induk terinventarisir		belum bisa pendataan secara keseluruhan	belum bisa masuk database		mulai melakukan beberapa pendataan pohon induk	4	2	8	sedang	penyederhanaan pendataan	koordinasi dg kecamatan	4	2	8	sedang	kepala Bidang Horbun	1 th anggaran
3	27	2.01.01	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi/ pembinaan tanaman pangan; Jumlah paket saprodi budidaya tanaman pangan;	masih rendahnya pengetahuan dan informasi penggunaan benih bersertifikat	R1	belum maksimalnya penggunaan dan ketersediaan benih bersertifikat	kurang maksimalnya hasil produksi dan provitas tanaman pangan	C	pembinaan penggunaan benih bersertifikat dan demfarm penggunaan benih bersertifikat	3	4	12	Tinggi	meningkatkan pengetahuan, informasi dan kemampuan petani tentang benih bersertifikat	melakukan sosialisasi dan pembinaan oleh petugas BPSB	2	4	8	sedang	kepala bidang tanaman.pangan	1 th anggaran
3	27	2.01.01	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah batang pengadaan bibit tanaman buah-buahan dan perkebunan	Kelompok sasaran terlalu banyak	R1	Semakin beragam jenis komoditas yang diusulkan	Pengadaan barang lebih kompleks permasalahannya	C	Menginventarisir dan mengelompokan jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan	4	4	16	Sangat tinggi	Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di ttingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diterima oleh kelompok pelaksana kegiatan	2	4	8	Sedang	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
								Musim hujan yang mundur	R2	Jadwal tanam mundur	Kurang maksimal waktu tanamnya	C	Persiapan lubang tanam sehingga begitu hujan langsung ditanam	3	3	9	Tinggi	Mengupdate perkembangan data iklim dan koordinasi dengan BMKG	Menganalisi data iklim dari BMKG serta berkoordinasi dengan penyuluh agar kelompok tani memelihara tanaman terlebih dahulu sebelum ditanam menunggu hujan turun	1	3	3	Rendah	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah Demplot Hortikultura	Belum ada pengalaman dalam persemaian dan waktunya lebih lama	R3	Benih/Bibit tidak tersedia baik kualitas maupun kuantitas	Demplot tidak terlaksana	C	Pendampingan dari produsen benih dan PPL	3	4	12	Tinggi	Pendampingan lebih intensif dari PPL	Pembinaan dan kunjungan ke lokasi	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Sarana dan Prasarana Demplot Tembakau	Perbedaan Waktu Tanam Di Beberapa Kecamatan, Kemungkinan Terjadi Rasionalisasi Anggaran	R4	Perbedaan Kualitas Dan Tembakau Kering Hasil Demplot, Pengaturan Lagi Kegiatan	Kurang Maksimalnya Kualitas Tembakau Kering	C	Penggunaan Bibit Tembakau Polibag, Mengusahakan agar sarana prasarana untuk demplot tembakau bisa tepat waktu	4	2	8	Sedang	Pembinaan dan pendampingan lebih instensif oleh Penyuluh	Pembinaan dan Kunjungan ke lokasi demplot	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
							Sarana dan Prasana pasca panen hortikultura dan perkebunan	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta penggunaan peralatan dan mesin penanganan pasca panen dan pengolahan terhadap pentingnya mutu dan keamanan pangan	R5	dalam melakukan pengolahan pascapanen Petani produsen masih menggunakan peralatan dan mesin penanganan pasca panen yang masih sederhana serta kurangnya kemampuan / pengetahuan pengolahan hasil kurang memperhatikan kualitas dan keamanan pangan	Pangan dan bahan pangan asal hortikultura dan perkebunan belum memenuhi kebutuhan konsumen sesuai kualitas dan kuantitas terbatas	C	Sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis peralatan dan mesin penanganan pasca panen serta pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan	4	3	12	Tinggi	Sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus	koordinasi dengan penyuluh pertanian di BPP kecamatan	2	4	8	Sedang	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah pameran dan promosi hasil produksi pertanian dan perkebunan yang diikuti	Tidak ada event promosi produksi pertanian dan perkebunan	R6	Tidak Terlaksananya Beberapa Kegiatan Promosi Luar dan Dalam Daerah	Komoditas unggulan tidak bisa dipromosikan	C	Penyusunan Kembali Rencana Pelaksanaan Kegiatan Promosi	3	4	12	Tinggi	Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait	Memilih promosi yang memungkinkan dilaksanakan	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok tani ternak yang dibina; Jumlah Timbangan Ternak yang Terpelihara, dan paket sarana dan prasarana pengolahan pakan	Sarana pembuat pakan belum memadai; Budaya/Kebiasaan peternak masih menggunakan alat tradisional; Penyuluhan kurang optimal.	R 1	Peternak belum bisa menyediakan/ mengolah pakan yang berkualitas	Ketersediaan pakan yang berkualitas belum mencukupi	C	Stimulasi dengan memberikan contoh model alat pengolahan pakan dan Memperbaiki metode penyuluhan.	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan Puskesmas dan BPP setempat untuk monitoring dan evaluasi serta pendampingan kelompok	Monitoring dan evaluasi ke kelompok yang telah mendapatkan pembinaan/ pelatihan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																			
3	27	2.01.01	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
3	27	2.01.01	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah kartu ternak yang terimplementasi	Aplikasi terlalu rumit; Petugas pencatat kartu ternak desa belum optimal;	R 1	Implementasi kartu ternak tidak tercapai	Target Jumlah kartu ternak yang tercetak tidak tercapai	C	Sosialisasi dan workshop kartu ternak	3	4	12	Tinggi	Menyederhanakan aplikasi dan mengoptimalkan petugas pencatat kartu ternak	Koordinasi dengan pembuat aplikasi, koordinasi dengan koordinator puskesmas untuk pendampingan petugas pencatat kartu ternak	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																			
3	27	2.01.01	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian																			
3	27	2.01.01	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas demplot area tanaman jagung; Luas demplot area tanaman padi; Luas demplot rintisan padi organik; Luas demplot area tanaman kedelai; Luas corporate farming; Jumlah kelompok vana dibantu benih	Data usulan CPCL yaitu kelompok pelaksana kegiatan kurang update sehingga tidak sesuai kondisi di lapangan	R1	Usulan CPCL kegiatan kurang valid	Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	C	Verifikasi usulan CPCL dan konfirmasi kembali ke petugas penyuluh di kecamatan terkait kesesuaian usulan dengan kondisi kelompok	2	4	8	Sedang	Verifikasi usulan CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan	Usulan CPCL dari kecamatan dilengkapi hardcopy yang ditandatangani petugas di tingkat kecamatan	1	2	2	Rendah	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1 Tahun Anggaran

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILI TAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							padi, pelatihan dan pendampingan (Kuota Kecamatan).	Banyaknya kelompok sasaran kegiatan	R2	Semakin beragam jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan sesuai masa tanamnya	Pengadaan barang lebih kompleks permasalahannya baik paket jumlah maupun terkait waktu pengadaan barang	C	Menginventarisir dan mengelompokkan jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan	3	4	12	Tinggi	Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diaplikasikan pada kelompok pelaksana kegiatan	2	4	8	Sedang	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)	Data kebutuhan pupuk bersubsidi yang tertuang dalam RDKK belum sesuai dengan kondisi di lapangan	R1	Belum efektifnya penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani	Pemberian pupuk bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran, jumlah, jenis, waktu, dan mutu	C	melaksanakan pendampingan dan pertemuan penyusunan RDKK dari tingkat Desa dan Kecamatan	4	4	16	Sangat Tinggi	Melaksanakan updating data kebutuhan pupuk bersubsidi secara berkala	melakukan koordinasi dengan petugas RDKK di tingkat Kecamatan	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
							Tersedianya Dokumen Data Alsintan	Data alsintan belum terdokumentasi dengan baik	R2	Kesulitan untuk mengetahui jenis maupun jumlah alsintan yang dibutuhkan petani	Sebaran alsintan tidak sesuai dengan kebutuhan petani	C	Mengupdate data alsintan untuk memperkirakan kebutuhan alsintan	3	4	12	Tinggi	Menyusun data pemanfaatan alsintan untuk mengetahui sebaran, jenis dan kondisi alsintan	Melakukan koordinasi dengan PPL Kecamatan untuk melakukan pendataan	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
							Terlaksananya Pengadaan Traktor Roda Dua, Pompa Air dan Alat Pra Panen Mendukung Corporate Farming	Spesifikasi teknis barang yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan	R3	Pengadaan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	Alsintan tidak terpenuhi sesuai dengan waktu yang direncanakan	UC	Melaksanakan pengadaan alsintan sesuai dengan perencanaan	3	3	9	Tinggi	Mencari informasi/survei harga dan barang dilakukan lebih awal	Melakukan koordinasi dengan penyedia yang tercantum dalam e-Catalog	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian																			
3	27	2.01.01	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Belum sinkron implementasi kewenangan pengelolaan irigasi oleh Dinas Pertanian dan Dinas PU/PR	R1	Air irigasi tidak sampai titik akhir meskipun JITUT sudah dibangun	Tingkat produktivitas tidak tercapai	C	Koordinasi dengan instansi terkait	3	4	12	Tinggi	Evaluasi Pelaksanaan	Koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait	2	4	8	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Usulan JUT tidak sesuai dengan spesifik teknis JUT (Poros Desa, belum ada embrio, tanggul inspeksi)	R2	Pembangunan JUT tidak dilaksanakan	Akses kegiatan usaha tani terhambat	C	Verifikasi usulan CPCL dan konfirmasi kembali ke Gapoktan dan petugas penyuluh di kecamatan terkait kesesuaian usulan dengan kondisi lapangan	4	4	16	Sangat Tinggi	Perubahan lokasi dalam 1 Gapoktan	Konfirmasi dengan Gapoktan dan stakeholder kemungkinan perubahan lokasi dalam 1 Gapoktan	2	4	8	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan Damparit	Belum sinkron implementasi kewenangan pengelolaan irigasi oleh Dinas Pertanian dan Dinas PU/PR	R4	Limpahan air liar tidak tertampung karena Damparit tidak terbangun	Tingkat produktivitas tidak tercapai	C	Koordinasi dengan instansi terkait	3	4	12	Tinggi	Evaluasi Pelaksanaan	Koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait	2	4	8	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) yang terpelihara, Jumlah Dokumen DED RPH	Penyusunan jadwal penyedia tidak tepat waktu	R1	Tidak jadi pemeliharaan bangunan dan lantai pemotongan serta pemeliharaan sumber air	Tidak ada perbaikan Sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan sehingga tetap kurang memadai	C	Memaksimalkan fungsi yang sudah ada				Tinggi	Penyusunan jadwal lebih awal dan dilaksanakan tepat waktu	Memperkirakan waktu musim hujan dan musim kemarau					Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Pembangunan/Rehab Gedung dan Prasarana dan Sarananya	Banyaknya Gedung BPP yang harus direhab kebutuhan sarana dan prasarannya	R1	Gedung sudah tidak layak dan membahayakan bila tetap dipakai	Menghambat kegiatan penyuluhan bagi Gapoktan /Poktan	C	Pengajuan Rehab Gedung/Prasaran dan Sarananya	3	4	12	Tinggi	Koordinasi Dengan BPPEDA	Penganggaran untuk perbaikan gedung	2	2	4	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan JIDES , JIAT			JIDES adalah sebagai prasaran pengambilan air untuk disalurkan tersier dan Pembangunan JIAT solusi kebutuhan air di musim kemarau	Tingkat produktivitas tidak tercapai	C	Koordinasi dengan instansi terkait	3	4	12	Tinggi	Evaluasi Pelaksanaan						Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Jumlah paket pembangunan, rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan dan perlengkapannya; DED	Action Plan lokasi Pusat Kesehatan Hewan belum tersedia secara menyeluruh; Tanah calon lokasi Pusat Kesehatan Hewan belum bersertifikat		Tidak terbangunnya Pusat Kesehatan Hewan dan perlengkapannya	Pusat Kesehatan Hewan belum sesuai dengan standar	C	Koordinasi dengan BPKAD dan BPN untuk mengurus sertifikat tanah; Usulan penyusunan Action Plan	4	4	16	Sangat Tinggi	Koordinasi dengan BPKAD dan BPN lebih intensif; Penyusunan Action harus direncanakan lebih matang	Bersurat kembali ke BPKAD dan BPN; Mengusulkan untuk penyusunan Action Plan	2	2	4	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
3	27	2.01.01	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pelaksanaan Kontes Ternak	Karena masih Pandemi	R2	Pelaksanaan Kontes ternak mundur	Pelaksanaan Kontes Ternak tidak sesuai perencanaan	C	Perencanaan Pelaksanaan Kontes harus lebih matang	2	3	6	Sedang	Perencanaan Pelaksanaan Kontes dievaluasi	Teknis Pelaksanaan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi khususnya bila masih pandemi	2	2	4	Rendah	Kepala Bidang Peternakan dan Keswan	1 tahun anggaran
							Jumlah ekor pengamanan bibit unggul ternak sapi	Kesadaran Peternak untuk mempertahankan bibit unggul Spi PO masih kurang (karena kebutuhan)	R3	Penjualan bibit unggul Sapi PO tidak terkendali	Berkurangnya ketersediaan bibit unggul Sapi PO	C	Pembinaan kepada peternak pembibit	3	4	12	Tinggi	Pemberian bibit kepada kelompok	Pemberian bibit dan instensifikasi IB dengan straw Sapi PO Kebumen	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah kelompok yang dilaksanakan pembinaan kelompok perbibitan dan budidaya	Kurangnya pemahaman kelompok terhadap kegiatan perbibitan	R4	Pemeliharaan ternak belum optimal atau sesuai pedoman	Bibit ternak yang dipelihara belum sesuai spesifikasi sebagai bibit ternak	C	Sosialisasi dan pembinaan kelompok perbibitan serta kelompok budidaya	3	4	12	Tinggi	Pendampingan kepada kelompok perbibitan	Monitoring dan evaluasi ke kelompok perbibitan dan Pembinaan secara berkala	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah kelompok tani ternak yang dibina; Jumlah unit gudang pakan yang terbangun; dan Jumlah paket sarana dan prasarana pengolahan pakan	Sarana pembuat pakan belum memadai; Budaya/Kebiasaan peternak masih menggunakan alat tradisional; Penyuluhan kurang optimal.	R 1	Peternak belum bisa menyediakan/ mengolah pakan yang berkualitas	Ketersediaan pakan yang berkualitas belum mencukupi	C	Stimulasi dengan memberikan contoh model alat pengolahan pakan dan Memperbaiki metode penyuluhan.	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan Puskesmas dan BPP setempat untuk monitoring dan evaluasi serta pendampingan kelompok	Monitoring dan evaluasi ke kelompok yang telah mendapatkan pembinaan/ pelatihan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
							Pengadaan Bantuan Bibit Ternak dan Perlengkapannya	Penyusunan jadwal penyedia tidak tepat waktu; KTT penerima belum menyiapkan sarana yang ditentukan	R2	Bantuan bibit ternak dan perlengkapannya tidak tersedia tepat waktu	Distribusi bantuan bibit ternak dan perlengkapannya tidak tepat waktu	C	Penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa lebih awal; Persiapan KTT dalam penyediaan sarana yang ditentukan	3	4	12	Tinggi	Koordinasi dengan pihak terkait lebih intensif; Pendampingan oleh petugas lapangan	Pertemuan dengan pihak-pihak terkait; Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan KTT	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah kegiatan identifikasi dan pembinaan kelembagaan	Kurangnya pemahaman kelompok terhadap budidaya ternak	R3	Budidaya ternak tidak sesuai pedoman	Ternak yang dipelihara perkembangannya belum optimal	C	Sosialisasi dan pembinaan kelompok budidaya	3	4	12	Tinggi	Pendampingan kepada kelompok budidaya	Monitoring dan evaluasi ke kelompok budidaya dan Pembinaan secara berkala	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																			
3	27	2.01.01	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
3	27	2.01.01	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengadaan obat-obatan ternak	Pengadaan tidak tepat waktu	R 1	Obat tidak tersedia saat dibutuhkan	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan tidak teratasi dengan baik	C	Rencana pengadaan obat tepat waktu	3	4	12	Tinggi	Hanya pelayanan pasif servis	Pemanfaat seoptimal mungkin dengan obat yang sudah ada	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	PENANGGUNG JAWAB	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							Penyelenggaraan Workshop kesehatan hewan	Kehadiran narasumber yang kompeten terbatas	R 1	Materi yang tersampaikan terbatas	Penguasaan ketrampilan maupun update keilmuan petugas mengalami kendala sehingga pemeliharaan dan pencegahan penyakit tidak maksimal	C	Sharing pengalaman dan pengetahuan antar petugas Puskesmas	3	3	9	Tinggi	Koodinasi dengan Narasumber dari Lembaga dan instansi terkait	Pelatihan dan pertemuan rutin melalui seminar, workshop, lokakarya dan sharing antar petugas lebih intensif	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota																			
3	27	2.01.01	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel feses dan darah ternak dan sampel produk bahan asal hewan yang mendapatkan diagnostik veteriner, jumlah pendataan penyakit ternak	Keahlian medis dan paramedis belum terampil dalam pengambilan sampel, baik sampel darah maupun jenis sampel lainnya	R 1	Uji lab tertunda atau tidak tepat waktu	Kualitas bibit sapi PO Kebumen tidak terdeteksi penyakitnya, termasuk penganjuan Lembaga Sertifikasi Produk untuk sapi bibit tertunda	C	Peningkatan kapasitas bagi petugas medis dan paramedis dalam pengambilan sampel	4	4	16	Sangat Tinggi	Pengiriman Petugas medis dan paramedis untuk melakukan pelatihan khusus di Balai Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor dan Balai Pelatihan Peternakan Batu Malang	Usulan kepada Balai pelatihan kesehatan Hewan untuk pencatatan calon peserta dan mengusulkan pelatihan ke BKPPD	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																			
3	27	2.01.01	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																			
3	27	2.01.01	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di tingkat kelompok tani/Capoktan di Kabupaten Kebumen; Jumlah pengadaan stok obat-obatan tanaman pangan	masih rendahnya ilmu pengetahuan dan ketrampilan petani tentang pengendalian OPT	R1	pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman belum maksimal	mengurangi hasil produksi dan produktivitas tanaman pangan	C	dilaksanakan SLPHT secara intensif di tingkat kelompok tani/ Gapoktan	3	4	12	tinggi	meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani tentang pengendalian serangan OPT	pelatihan dan pendampingan SLPHT di kelompok secara oleh POPT	2	3	6	sedang	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																			
3	27	2.01.01	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																			
3	27	2.01.01	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlatihnya Petani dalam hal pembuatan pupuk organik	Penyuluhan PPL kurang optimal.	R1	Ketidakpedulian petani terhadap pembuatan pupuk organik.	Petani tidak menggunakan pupuk organik.	C	Melakukan koordinasi dengan Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan dari Poktan yang menerima pelatihan pembuatan pupuk organik	3	4	12	Tinggi	Peningkatan kunjungan lapangan PPL ke petani untuk menyerap aspirasi terkait kegiatan pertanian sebagai dasar penyusunan program Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Peningkatan koordinasi dan komunikasi petugas dengan kelompok tani di wilayahnya	2	4	8	Sedang	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1 Tahun Anggaran
							Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan dan program tingkat kabupaten	Data tidak valid dan proses penyusunan program penyuluhan belum sesuai pedoman	R1	Kualitas Program Penyuluhan belum sesuai dengan pedoman	Programa Penyuluhan yang tersusun belum menjadi acuan kegiatan penyuluhan	C	Pertemuan Penyusunan Program dan supervisi dari Dinas/Kabupaten	4	4	16	Sangat Tinggi	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	Bimtek Penyusunan Program dan Pendampingan sesuai pedoman dengan narasumber dari Lembaga yang Kompeten	3	4	12	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah Tenaga Pendamping kegiatan pertanian	Kekurangan tenaga penyuluh karena Pensiun	R3	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian tidak optimal	Target Kegiatan pertanian tidak tercapai	C	Rekrutmen tenaga pendamping penyuluh pertanian	4	4	16	Sangat Tinggi	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Petani	Latihan, Kunjungan dan Supervisi baik untuk penyuluh atau petani	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3	27	2.01.01	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok yang meningkat kualitas lembaga taninya	Kapasitas pengurus belum memadai	R1	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Target kelompok yang meningkat kualitas lembaga taninya belum tercapai	C	Koordinasi dengan BPP untuk melakukan pendampingan ,Reorganisasi, dan Pembinaan kelompok	3	3	9	Tinggi	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui anjngsana penyuluh	Kunjungan (anjngsana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah kelompok yang terlayani pembinaan dan penilaian kelas kelompok	Indikator penilaian kelas kelompok tidak konsisten menunjukan performa kelompok	R2	Hasil penilaian kelas kelompok kurang valid	Kelas kelompok tidak selalu menunjukan kemampuan/ kualitas kelompok	C	Melaksanakan penilaian kelas kelompok sesuai pedoman	4	4	16	Sangat Tinggi	Melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator penilaian kelas kelompok	Koordinasi dengan Koordinator Jabatan Fungsional dan Koordinator Penyuluh terkait indikator penilaian	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah kegiatan pengelolaan irigasi partisipatif dan terpadu	Pembangunan Fisik Irigasi belum dilaksanakan	R3	Kegiatan Sekolah Lapang belum optimal	Kegiatan pengelolaan irigasi partisipatif dan terpadu belum optimal	C	Melaksanakan seoptimal mungkin kegiatan yang dapat dilaksanakan	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan instansi terkait dan optimalisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan	Lebih intensif koordinasi dengan instansi terkait	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
							Terlaksananya pembinaan kelompok penerima PMUK, P4K, dan PUAP	Kapasitas pengurus belum memadai	R2	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan modal secara bersama belum sesuai target	C	Koordinasi dengan BPP untuk melakukan pendampingan kelompok	3	3	9	Tinggi	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui anjngsana penyuluh	Kunjungan (anjngsana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
X		2.01.01																							
X	XX	2.01.01																							
X	XX	2.01.01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
X	XX	2.01.01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
X	XX	2.01.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (LaporanForum OPD)	Kehadiran peserta dan Narasumber Forum PD	R 1	Materi Forum PD tidak terinformasi dan validasi Renja PD kurang khususnya validasi lokasi progam dan kegiatan	Lokasi Program dan Kegiatan pada Renja PD kurang valid	C	Koordinasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan Forum, undangan dan materi disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi melalui pertemuan dan melalui sosial media	Undangan dan materi disampaikan tepat waktu baik ke Peserta ataupun Narasumber	1	2	2	kecil	PPTK	1 Tahun Anggaran
							Jumlah dokumen (Renja dan Renstra)	Kehadiran peserta Penyusunan Renja PD	R 2	Materi Renja PD tidak terinformasikan dan Renja PD kurang valid	Renja PD tersusun Kurang Valid	C	Koordinasi jadwal penyusunan Renja PD	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait serta koordinasi internal dengan bidang jadwal penyusunan Renja PD	Penyampaian materi dan hasil Rapat Penyusunan Renja baik hard copy atau file melalui sosial media	1	2	2	kecil	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
								Kehadiran peserta dan Narasumber Kegiatan Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian. Adanya Rasionalisasi anggaran	R 3	Materi Penyusunan Action Plan tidak terinformasikan dan Bahan Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan kurang valid. Kegiatan Penyusunan Action Plan tidak terlaksana	Action Plan Pengembangan Kawasan tidak tersusun	UC/C	Koordinasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan kegiatan,	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik kabupaten, provinsi dan Pusat. dan Koordinasi antar bidang. Pencermatan rasionalisasi anggaran.	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media kegiatan yang sudah dilakukan. Penganggaran tahun berikutnya.	1	2	2	kecil	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Kehadiran peserta dan Narasumber Kegiatan Penyusunan Renstra. Adanya rasionalisasi anggaran	R4	Materi Renja PD tidak terinformasikan dan Renstra PD kurang valid. Kegiatan Penyusunan Renstra tidak terlaksana	Renstra PD tidak tersusun	UC/C	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan kegiatan,	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan kegiatan, dan koordinasi dengan bidang - bidang	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan penganggaran tahun berikutnya.	1	2	2	kecil	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
							Jumlah Dokumen (RKA/RKAP, DPA/ DPPA, KAK dan RKO)	Kehadiran Peserta Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA,	R 5	Aturan yang berlaku dan baru dalam penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA tidak tersampaikan	RKA/RKAP dan DPA/DPPA tidak sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu	C	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan RKA/ RKAP dan DPA/ DPPA,	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan RKA/ RKAP dan DPA/ DPPA dengan instansi terkait, dan koordinasi dengan bidang lebih intensif	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (LKJIP, LKPJdan LPPD)	Kehadiran Peserta Penyusunan LKPJ/LPPD,	R 1	Bahan LKPJ/ LPPD tidak terkumpul secara lengkap	Penyusunan LKPJ/ LPPD tidak valid dan tepat waktu	C	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan LKPJ/ LPPD dengan instansi terkait	2	3	6	Moderat	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan LKPJ/ LPPD dengan instansi terkait, koordinasi dengan bidang lebih intensif	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
								Kehadiran Peserta Penyusunan LKJIP.	R2	Bahan LKJIP kurang lengkap dan terlambat terselesaikan/ tidak sesuai jadwal	LKJIP tersusun tidak valid dan tepat waktu	C	Koordinasi jadwal Penyusunan LKJIP, dan penyampaian materi baik hard copy atau file melalui sosial media	2	3	6	Moderat	Koordinasi dan konsultasi jadwal Penyusunan LKJIP dengan instansi terkait, dan koordinasi dengan bidang - bidang secara intensif	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rakor POP/ K	Kehadiran peserta dan narasumber Rakorpop K	R 1	Tidak adanya solusi pemecahan permasalahan sehingga target kinerja tidak tercapai	Indikator Kinerja PD tidak tercapai	C	Koordinasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan rakorpop K,	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan instansi terkait untuk jadwal pelaksanaan rakorpop K	Undangan dan materi disampaikan sebelum rapat dan hasil Rakorpop baik hard copy atau file dikirim melalui sosial media kepada Narasumber	1	2	2	kecil	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran
							Jumlah dokumen capaian kinerja triwulan dan bulanan	Data Monitoring dan Evaluasi tidak lengkap	R 2	Bahan Analisa data tidak lengkap	Analisa data untuk perencanaan tahun berikutnya tidak lengkap	C	Koordinasi dengan bidang - bidang dan petugas di lapangan,	2	3	6	Moderat	Koordinasi dengan bidang - bidang dan petugas di lapangan,	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran
							Jumlah rapat (SPIP dan penyusunan SOP)	Kehadiran Peserta dan Narasumber Penyusunan SPIP	R3	Informasi terbaru tentang SPIP tidak tersampaikan sehingga kelengkapan bahan SPIP tidak tersedia	SPIP belum tersusun sesuai aturan yang berlaku dan tidak lengkap	C	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait Penyusunan SPIP,	2	3	6	Moderat	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait jadwal Penyusunan SPIP, dan koordinasi dengan bidang - bidang	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	Kepala Dinas	1 Tahun Anggaran

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Kehadiran Peserta dan Narasumber Penyusunan SOP	R 4	Informasi terbaru tentang SOP tidak tersampaikan sehingga kelengkapan bahan SOP tidak tersedia	SOP belum tersusun sesuai aturan yang berlaku dan tidak lengkap	C	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait Penyusunan SOP, dan penyampaian materi baik hard copy atau file melalui sosial media	2	3	6	Moderat	Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi terkait Penyusunan SOP, dan koordinasi dengan bidang - bidang	Penyampaian materi dan hasil baik hard copy atau file melalui sosial media, dan pengecekan dan ceklis kegiatan	2	2	4	rendah	PPTK	1 Tahun Anggaran
							Jumlah kegiatan pengumpulan, penyusunan dan sinkronisasi data statistik pertanian	Tidak terdapat supervisi dari kepala seksi pendataan, Data yang tidak sinkron antar bidang, kehilangan data/ data tidak ada atau kurang, Data berasal dari sumber yang berbeda sehingga data tidak valid dan tidak dapat dianalisa, Proses berulang untuk setiap jenis laporan yang sama sehingga tidak efisien, Lambatnya arus informasi pelaporan, serta rasionalisasi	R 5	Pengelolaan data dan informasi statistik pertanian belum efektif dan efisien	Data dan informasi yang belum A3 (Accurate, Accessible, dan Accountable)	UC/C	Report data harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan. Pelaporan melalui aplikasi data statistik pertanian	4	4	16	sangat tinggi	Sinkronisasi data statistik pertanian dan pelaporan data statistik pertanian secara berkala melalui aplikasi data statistik pertanian	Ceklis secara berkala, pengembangan aplikasi, penganggaran pengumpulan data	2	4	8	sedang	PPTK	1 Tahun Anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
X	XX	2.01.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Tercukupinya Gaji Jumlah Bulan Tersedia Kebutuhan Tamsil dan Insentif ASN	input Data Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak terinput dengan benar	R1	Gaji dan Tunjangan tidak terbayarkan	Hak sebagai PNS tidak terpenuhi	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Input Data Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPDtidak terinput dengan benar	R1	Honorarium tidak terbayarkan	Penanggungjawab pengelola keuangan tidak mendapat haknya	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
			01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
X	XX	2.01.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak cermat	R1	Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak cermat	R1	Kebutuhan makan minum rapatr tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak cermat	R1	Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tidak cermat	R1	KebutuhanBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
X	XX	2.01.01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Penyediaan Bahan/Material tidak cermat	R1	Kebutuhan Alat tulis kantor tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan fasilitas kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak cermat	R1	Kebutuhan Biaya perjalanan dinas luar daerah tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
		2.01.01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku												
X	XX	2.01.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan kursi Jumlah pengadaan lemariarsip/rak arsip	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Pengadaan Mebel tidak cermat	R1	Kebutuhan Biaya Pengadaan Mebel tidak terpenuhi	Kebutuhan sarana / prasarana tidak tercukupi	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Kepala Dinas	1 Tahun anggaran
								Barang tidak tersedia di pasar atau aplikasi pengadaan	R2	Barang/spek yang diinginkan tidak terbeli	Tidak terlaksananya kegiatan pengadaan mebel	C	Pastikan spek tersedia di pasar/aplikasi	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan BPKAD	Memastikan ketersediaan barang di pasar/aplikasi	3	3	9	Tinggi	Kepala Dinas	1 Tahun anggaran
								Perencanaan kebutuhan pengadaan barang tidak valid	R3	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	Barang tidak tetsedia secara maskimal	C	Memastikan kebutuhan barang dengan benar sesuai RKBMD	3	3	9	Tinggi	Pengurus barang memastikan kebutuhan dengan benar	Membuat rekap RKBMD	3	3	9	Tinggi	Kepala Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan kamera Jumlah pengadaan laptop/tablet Jumlah pengadaan printer	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak cermat	R1	Kebutuhan Biaya Pengadaan Peralatan kantor tidak terpenuhi	Kebutuhan sarana / prasarana kurang maksimal	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Kepala Dinas	1 Tahun anggaran
								Barang tidak tersedia di pasar atau aplikasi pengadaan	R2	Barang/spek yang diinginkan tidak terbeli	Tidak terlaksananya kegiatan pengadaan Peralatan kantor	C	Pastikan spek tersedia di pasar/aplikasi	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan BPKAD	Memastikan ketersediaan barang di pasar/aplikasi	3	3	9	Tinggi	Kepala Dinas	1 Tahun anggaran
								Perencanaan kebutuhan pengadaan barang tidak valid	R3	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	Barang tidak tetsedia secara maskimal	C	Memastikan kebutuhan barang dengan benar sesuai RKBMD	3	3	9	Tinggi	Pengurus barang memastikan kebutuhan dengan benar	Membuat rekap RKBMD	3	3	9	Tinggi	Kepala Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan genset Jumlah pengadaan gordyn Jumlah pengadaan jaringan distribusi tegangan Jumlah pengadaan plang kantor BPP/ Puskesmas Jumlah pengadaan taplak	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak cermat	R1	Kebutuhan Biaya Pengadaan Perlengkapan kantor tidak terpenuhi	Tidak terlaksananya kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung tidak cermat	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Kepala Dinas	1 Tahun anggaran
								Barang tidak tersedia di pasar atau aplikasi pengadaan	R2	Barang/spek yang diinginkan tidak terbeli	Tidak terlaksananya kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	C	Pastikan spek tersedia di pasar/aplikasi	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan BPKAD	Memastikan ketersediaan barang di pasar/aplikasi	3	3	9	Tinggi	Kepala Dinas	1 Tahun anggaran
								Perencanaan kebutuhan pengadaan barang tidak valid	R3	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	Barang tidak tetsedia secara maskimal	C	Memastikan kebutuhan barang dengan benar sesuai RKBMD	3	3	9	Tinggi	Pengurus barang memastikan kebutuhan dengan benar	Membuat rekap RKBMD	3	3	9	Tinggi	Kepala Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan					C													

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
X	XX	2.01.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak cermat	R1	Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak cermat	R1	Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak cermat	R1	Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
X	XX	2.01.01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak cermat	R1	Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tidak cermat	R1	Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
X	XX	2.01.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor, BPPdan Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan rutin	Input anggaran/perhitungan rencana kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan tidak cermat	R1	Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terpenuhi	menghambat kelancaran pekerjaan / mengurangi kenyamanan tempat bekerja	C	Input data dengan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	3	3	Rendah	Koordinasi dengan BAPPEDA, BPKAD dan Bagian Pembangunan	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran
							Survei kebutuhan rehab tidak akurat		R2	Kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak terlaksana dengan baik	menghambat kelancaran pekerjaan / mengurangi kenyamanan tempat bekerja	C	Pencermatan rencana alokasi kebutuhan rehab	3	3	9	Tinggi	Memastikan kebutuhan rehab dengan tinjau langsung ke lokasi	Pengecekan data dengan cermat secara hirarki	1	3	3	Rendah	Sekretaris Dinas	1 Tahun anggaran

Kebumen, 7 Desember 2020
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H.TRI HARYONO
NIP: 19620111 198603 1 018

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT

LAMPIRAN

DAFTAR PENILAIAN RISIKO SETELAH EVALUASI

LAPORAN HASIL EVALUASI
DAFTAR PENILAIAN RISIKO (DPR) DAN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PADA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

REKAPITULASI ANALISIS RESIKO
SUB KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(1)					(2)					(3)					(4)				(5)				(6)				(7)				(8)				(9)				(10)				(11)				(12)				(13)				(14)				(15)				(16)				(17)				(18)				(19)				(20)				(21)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2		2.01.01				DINAS PERTANIAN DAN PANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

NOMOR					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU																																
							SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO																																		
(1)					(2)					(3)					(4)				(5)	(6)				(7)				(8)	(9)				(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				(15)				(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				(21)			
							Belum adanya dasar pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan	R 2	Pendistribusian cadangan pangan tidak sesuai dengan ketentuan	Pemanfaatan cadangan pangan tidak tepat sasaran	C	Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012 ttg pangan ttg pemanfaatan cadangan pangan yang harus ditindaklanjuti dengan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota ttg pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	3	3	9	Tinggi	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan	Rapat Penyusunan Perbup	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran																																
							Rekanan tidak mempunyai barang sesuai dengan standar	R 3	Ketidaksesuaian dengan spesifikasi	Cadangan pangan tidak tersedia tepat waktu	C	Pemeriksaan pekerjaan	3	3	9	Tinggi	Penunjukan tim PPHP yang Profesional	Pemeriksaan pekerjaan dan menyusun BA pemeriksaan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran																																
							Penyedia barang/jasa tidak disiplin	R 4	Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan	Cadangan pangan tidak tersedia tepat waktu	C	Membuat Sanksi Keterlambatan	3	3	9	Tinggi	Monitoring kemajuan pekerjaan	Menyusun laporan kemajuan pekerjaan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran																																
							Cadangan pangan berupa beras dan gabah mempunyai umur teknis pendek, penurunan kualitas gudang cadangan pangan	R 5	Penurunan kualitas cadangan pangan	Kurangnya kualitas cadangan pangan	C	Pemeliharaan	4	3	12	Tinggi	Pengelolaan cadangan pangan	Penggantian cadangan pangan secara berkala	3	2	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran																																
							Pencatatan keluar masuk cadangan pangan tidak dilakukan secara rutin	R6	Data cadangan pangan tidak tersedia	Laporan stok cadangan pangan tidak akurat	C	Penyaluran bantuan cadangan pangan dilengkapi berita acara penyerahan bantuan	3	3	9	Tinggi	Pencatatan keluar masuk cadangan pangan dilakukan secara rutin	Pemeriksaan stok dengan membandingkan dokumen pengeluaran dengan stok di gudang secara periodik	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran																																
2	09	2.01.01	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																																																		
2	09	2.01.01	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan dan pemberian stimulan percepatan penganeka ragam konsumsi pangan	R 1	Kerbelanjutan kegiatan tidak maksimal	Kegiatan tidak berkelanjutan	C	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan	3	3	9	Tinggi	Pembinaan dan Pendampingan secara intensif	Kunjungan ke kelompok	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahan Pangan	1 Tahun Anggaran																																
							Barang yang tersedia tidak sesuai spesifik teknis	R2	Pengadaan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	Barang tidak terpenuhi sesuai dengan waktu yang direncanakan	C	Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan perencanaan	3	3	9	Tinggi	Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Mencari informasi/survei harga dan barang dilakukan lebih awal	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahan Pangan	1 Tahun Anggaran																																
2	09	2.01.01	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah kegiatan survey pola konsumsi pangan	R1	Data analisis tidak tersedia tepat waktu	Hasil survey pola konsumsi pangan tidak tersedia tepat waktu	C	Koordinasi dengan BPS	3	3	9	Tinggi	Tenaga survey dari penyuluh dan mitra BPS	Bekerjasama dengan BPS	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun																																
2	09	2.01.01	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																																																		
2	09	2.01.01	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan																																																		
2	09	2.01.01	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan	R1	Analisis Penyusunan Peta tidak dapat terlaksana	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tidak tersedia	C	Koordinasi dengan OPD terkait	3	3	9	Tinggi	Menggunakan Data Proxy	Membuat kesepakatan dengan OPD terkait	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun																																
2	09	2.01.01	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota																																																		
2	09	2.01.01	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah desa yang melaksanakan pemberdayaan mandiri pangan	R1	Temak tidak berkembangbiak dengan baik	Kegagalan dalam penanganan kerawanan pangan	C	Memberikan Sosialisasi dan Pelatihan kepada Calon Penerima Hibah	3	3	9	Tinggi	Pembinaan dan pendampingan secara terus menerus	Kunjungan Langsung Ke Kelompok Penerimaanya oleh penyuluh/ petugas di kecamatan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran																																
2	09	2.01.01	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																																																		
2	09	2.01.01	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota																																																		

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	09	2.01.01	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada produsen dan pedagang	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Permentan 53/ 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	R1	Higiene sanitasi terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan tidak diperhatikan	Pangan Segar Asal Tumbuhan belum ada ijin edarnya	C	Sosialisasi dan Pembinaan	3	4	12	Tinggi	Sosialisasi dan Pembinaan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Melakukan penilaian higiene sanitasi terhadap kelompok/pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang mendaftar registrasi	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah sampel pangan yang diperiksa pada pengawasan pangan	Pengawasan/ pemantauan mutu dan keamanan pangan tidak dilaksanakan secara periodik	R2	Mutu dan keamanan pangan tidak terawasi dan terpantau	Masih adanya produk pangan yang ditemukan mengandung bahan yang berbahaya	C	Pemantauan dan pengambilan sampel secara berkala untuk di uji baik pangan segar maupun pangan olahan di pasar tradisional maupun pasar modern/ swalayan di wilayah Kabupaten Kebumen	3	3	9	Tinggi	Pengawasan/ pemantauan dilakukan secara periodik	Koordinasi dan pemantauan bersama Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 Tahun Anggaran
3		2.01.01				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	27	2.01.01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
3	27	2.01.01	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																			
3	27	2.01.01	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota																			
3	27	2.01.01	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	evaluasi pohon induk kelapa dan pohon induk cengkeh	Kurangnya tenaga pendataan pohon induk terpilih		belum semuanya pohon induk terinventarisir	Database pohon induk terpilih tidak tersedia		mulai melakukan beberapa pendataan pohon induk	4	2	8	sedang	Koordinasi dengan kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan	Inventarisasi secara berkala	3	2	6	Sedang	kepala Bidang Horbun	1 th anggaran
3	27	2.01.01	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi/ pembinaan tanaman pangan; Jumlah paket saprodi budidaya tanaman pangan;	masih rendahnya pengetahuan dan informasi penggunaan benih bersertifikat	R1	belum maksimalnya penggunaan dan ketersediaan benih bersertifikat	kurang maksimalnya hasil produksi dan provitas tanaman pangan	C	pembinaan penggunaan benih bersertifikat dan demfarm penggunaan benih bersertifikat	3	4	12	Tinggi	meningkatkan pengetahuan, informasi dan kemampuan petani tentang benih bersertifikat	melakukan sosialisasi dan pembinaan oleh petugas BPSB	2	3	6	Sedang	kepala bidang tanaman.pangan	1 th anggaran
3	27	2.01.01	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah batang pengadaan bibit tanaman buah-buahan dan perkebunan	Kelompok sasaran terlalu banyak	R1	Semakin beragam jenis komoditas yang diusulkan	Pengadaan barang lebih kompleks permasalahannya	C	Menginventarisir dan mengelompokan jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan	4	4	16	Sangat tinggi	Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diterima oleh kelompok pelaksana kegiatan	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
							Musim hujan yang mundur		R2	Jadwal tanam mundur	Kurang maksimal waktu tanamnya	C	Persiapan lubang tanam sehingga begitu hujan langsung ditanam	3	3	9	Tinggi	Mengupdate perkembangan data iklim dan koordinasi dengan BMKG	Menganalisi data iklim dari BMKG serta berkoordinasi dengan penyuluh agar kelompok tani memelihara tnaman terlebih dahulu sebelum ditanam menunggu hujan turun	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
							Jumlah Demplot Hortikultura	Belum ada pengalaman dalam persemaian dan waktunya lebih lama	R3	Benih/Bibit untuk pertanaman tidak tersedia baik kualitas maupun kuantitas	Demplot tidak terlaksana	C	Pendampingan dari produsen benih dan PPL	3	4	12	Tinggi	Pendampingan lebih intensif dari PPL	Pembinaan dan kunjungan ke lokasi	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
							Sarana dan Prasarana Demplot Tembakau	Perbedaan waktu tanam di beberapa Kecamatan	R4	Perbedaan Kualitas Dari Tembakau Kering Hasil Demplot	Kurang Maksimalnya Kualitas Tembakau Kering	C	Penggunaan Bibit Tembakau Polibag, Mengusahakan agar sarana prasarana untuk demplot tembakau bisa tepat waktu	4	3	12	Tinggi	Tanam secara serentak di lokasi demplot	Pembinaan dan Kunjungan ke lokasi demplot	3	2	6	Sedang	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran

NOMOR					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
							SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Sarana dan Prasarana pasca panen hortikultura dan perkebunan	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta penggunaan peralatan dan mesin penanganan pasca panen dan pengolahan terhadap pentingnya mutu dan keamanan pangan	R5	dalam melakukan pengolahan pascapanen Petani produsen masih menggunakan peralatan dan mesin penanganan pasca panen yang masih sederhana serta kurangnya kemampuan / pengetahuan pengolahan hasil kurang memperhatikan kualitas dan keamanan pangan	Pangan dan bahan pangan asal hortikultura dan perkebunan belum memenuhi kebutuhan konsumen sesuai kualitas dan kuantitas terbatas	C	Sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis peralatan dan mesin penanganan pasca panen serta pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan	4	3	12	Tinggi	Sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus	koordinasi dengan penyuluh pertanian di BPP kecamatan	3	2	6	Sedang	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
						Jumlah pameran dan promosi hasil produksi pertanian dan perkebunan yang diikuti	Tidak ada event promosi produksi pertanian dan perkebunan	R6	Tidak Terlaksananya Beberapa Kegiatan Promosi Luar dan Dalam Daerah	Komoditas unggulan tidak bisa dipromosikan	C	Penyusunan Kembali Rencana Pelaksanaan Kegiatan Promosi	3	4	12	Tinggi	Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait	Memilih promosi yang memungkinkan dilaksanakan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok ternak yang dibina; Jumlah Timbangan Ternak yang Terpelihara, dan paket sarana dan prasarana pengolahan pakan	R 1	Peternak belum bisa menyediakan/ mengolah pakan yang berkualitas	Ketersediaan pakan yang berkualitas belum mencukupi	C	Stimulasi dengan memberikan contoh model alat pengolahan pakan dan Memperbaiki metode penyuluhan.	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan Puskesmas dan BPP setempat untuk monitoring dan evaluasi serta pendampingan kelompok	Monitoring dan evaluasi ke kelompok yang telah mendapatkan pembinaan/ pelatihan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
3	27	2.01.01	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																		
3	27	2.01.01	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah kartu ternak yang terimplementasi	R 1	Implementasi kartu ternak tidak tercapai	Target Jumlah kartu ternak yang tercetak tidak tercapai	C	Sosialisasi dan workshop kartu ternak	3	4	12	Tinggi	Menyederhanakan aplikasi dan mengoptimalkan petugas pencatat kartu ternak	Koordinasi dengan pembuat aplikasi, koordinasi dengan koordinator puskesmas untuk pendampingan petugas pencatat kartu ternak	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																		
3	27	2.01.01	03	2.01		Pembinaan Prasarana Pertanian																		
3	27	2.01.01	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas demplot area tanaman jagung; Luas demplot area tanaman padi; Luas demplot rintisan padi organik; Luas demplot area tanaman kedelai; Luas corporate farming; Jumlah kelompok yang dibantu benih padi, pelatihan dan pendampingan (Kuota Kecamatan).	R1	Usulan CPCL kegiatan kurang valid	Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	C	Verifikasi usulan CPCL dan konfirmasi kembali ke petugas penyuluh di kecamatan terkait kesesuaian usulan dengan kondisi kelompok	3	4	12	Tinggi	Verifikasi usulan CPCL oleh petugas penyuluh di tingkat kecamatan	Usulan CPCL dari kecamatan dilengkapi hardcopy yang ditandatangani petugas di tingkat kecamatan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1 Tahun Anggaran
							Banyaknya kelompok sasaran kegiatan	R2	Semakin beragam jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan sesuai masa tanamnya	Pengadaan barang lebih kompleks pemasalahannya baik paket jumlah maupun waktu pengadaan barang	C	Menginventarisir dan mengelompokkan jenis komoditas maupun varietas yang diusulkan	3	4	12	Tinggi	Penyederhanaan jenis usulan baik komoditas maupun varietas	Koordinasi dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan terkait komoditas dan varietas alternatif yang mungkin dapat diaplikasikan pada kelompok pelaksana kegiatan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)	R1	Belum efektifnya penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani	Pemberian pupuk bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran, jumlah, jenis, waktu, dan mutu	C	melaksanakan pendampingan dan pertemuan penyusunan RDKK dari tingkat Desa dan Kecamatan	4	4	16	Sangat Tinggi	Melaksanakan updating data kebutuhan pupuk bersubsidi secara berkala	melakukan koordinasi dengan petugas RDKK di tingkat Kecamatan	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
						Tersedianya Dokumen Data Alsintan	Data alsintan belum terdokumentasi dengan baik	R2	Kesulitan untuk mengetahui jenis maupun jumlah alsintan yang dibutuhkan petani	Sebaran alsintan tidak sesuai dengan kebutuhan petani	C	Mengupdate data alsintan untuk memperkirakan kebutuhan alsintan	3	4	12	Tinggi	Menyusun data pemanfaatan alsintan untuk mengetahui sebaran, jenis dan kondisi alsintan	Melakukan koordinasi dengan PPL Kecamatan untuk melakukan pendataan	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran

NOMOR					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
							SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Pengadaan Bantuan Bibit Ternak dan Perlengkapannya	Penyusunan jadwal penyedia tidak tepat waktu; KTT penerima belum menyiapkan sarana yang ditentukan	R5	Bantuan bibit ternak dan perlengkapannya tidak tersedia tepat waktu	Distribusi bantuan bibit ternak dan perlengkapannya tidak tepat waktu	C	Penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa lebih awal; Persiapan KTT dalam penyediaan sarana yang ditentukan	3	4	12	Tinggi	Koordinasi dengan pihak terkait lebih intensif; Pendampingan oleh petugas lapangan	Pertemuan dengan pihak-pihak terkait; Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan KTT	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
						Jumlah kegiatan identifikasi dan pembinaan kelembagaan	Kurangnya pemahaman kelompok terhadap budidaya ternak	R6	Budidaya ternak tidak sesuai pedoman	Ternak yang dipelihara perkembangannya belum optimal	C	Sosialisasi dan pembinaan kelompok budidaya	3	4	12	Tinggi	Pendampingan kepada kelompok budidaya	Monitoring dan evaluasi ke kelompok budidaya dan Pembinaan secara berkala	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																		
3	27	2.01.01	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
3	27	2.01.01	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengadaan obat-obatan ternak	R 1	Obat tidak tersedia saat dibutuhkan	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan tidak teratasi dengan baik	C	Rencana pengadaan obat tepat waktu	3	4	12	Tinggi	Hanya pelayanan pasif servis	Pemanfaat seoptimal mungkin dengan obat yang sudah ada	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
						Penyelenggaraan Workshop kesehatan hewan	Kehadiran narasumber yang kompeten terbatas	R2	Materi yang tersampaikan terbatas	Penguasaan ketrampilan maupun update keilmuan petugas mengalami kendala sehingga pemeliharaan dan pencegahan penyakit tidak maksimal	C	Sharing pengalaman dan pengetahuan antar petugas Puskesmas	3	3	9	Tinggi	Koodinasi dengan Narasumber dari Lembaga dan instansi terkait	Pelatihan dan pertemuan rutin melalui seminar, workshop, lokakarya dan sharing antar petugas lebih intensif	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota																		
3	27	2.01.01	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah sampel feses dan darah ternak dan sampel produk bahan asal hewan yang mendapatkan diagnostik veteriner, jumlah pendataan penyakit ternak	R 1	Uji lab tertunda atau tidak tepat waktu	Kualitas bibit sapi PO Kebumen tidak terdeteksi penyakitnya, termasuk penganjutan Lembaga Sertifikasi Produk untuk sapi bibit tertunda	C	Peningkatan kapasitas bagi petugas medis dan paramedis dalam pengambilan sampel	4	4	16	Sangat Tinggi	Pengiriman Petugas medis dan paramedis untuk melakukan pelatihan khusus di Balai Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Bogor dan Balai Pelatihan Peternakan Batu Malang	Usulan kepada Balai pelatihan kesehatan Hewan untuk pencatatan calon peserta dan mengusulkan pelatihan ke BKPPD	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																		
3	27	2.01.01	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																		
3	27	2.01.01	05	2.01	01	Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di tingkat kelompok tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen; Jumlah pengadaan stok obat-obatan tanaman pangan	Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) di tingkat kelompok tani/Gapoktan di Kabupaten Kebumen; Jumlah pengadaan stok obat-obatan tanaman pangan	R1	pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman belum maksimal	mengurangi hasil produksi dan produktivitas tanaman pangan	C	dilaksanakan SLPHT secara intensif di tingkat kelompok tani/ Gapoktan	3	4	12	tinggi	meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani tentang pengendalian serangan OPT	pelatihan dan pendampingan SLPHT di kelompok secara oleh POPT	2	3	6	sedang	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1 Tahun Anggaran
3	27	2.01.01	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																		
3	27	2.01.01	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																		
3	27	2.01.01	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlatihnya Petani dalam hal pembuatan pupuk organik	R1	Ketidakpedulian petani terhadap pembuatan pupuk organik.	Petani tidak menggunakan pupuk organik.	C	Melakukan koordinasi dengan Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan dari Poktan yang menerima pelatihan pembuatan pupuk organik	3	4	12	Tinggi	Peningkatan kunjungan lapangan PPL ke petani untuk menyerap aspirasi terkait kegiatan pertanian sebagai dasar penyusunan program Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Peningkatan koordinasi dan komunikasi petugas dengan kelompok tani di wilayahnya	2	4	8	Sedang	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1 Tahun Anggaran

NOMOR						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	PERNYATAAN RISIKO				UC/C	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	STATUS RISIKO (INHERENT RISK)				RENCANA TINDAK PENGENDALIAN		STATUS RISIKO (RESIDUAL RISK)				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
								SEBAB	NO.	RISIKO	AKIBAT			KEMUNGKINAN	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO	OPSI STRATEGI PENGENDALIAN	LANGKAH PENGENDALIAN	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan dan program tingkat kabupaten	Data tidak valid dan proses penyusunan programa penyuluhan belum sesuai pedoman	R2	Kualitas Programa Penyuluhan belum sesuai dengan pedoman	Programa Penyuluhan yang tersusun belum menjadi acuan kegiatan penyuluhan	C	Pertemuan Penyusunan Program dan supervisi dari Dinas/Kabupaten	4	4	16	Sangat Tinggi	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	Bimtek Penyusunan Program dan Pendampingan sesuai pedoman dengan narasumber dari Lembaga yang Kompeten	3	4	12	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran	
						Jumlah Tenaga Pendamping kegiatan pertanian	Kekurangan tenaga penyuluh karena Pensiun	R3	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian tidak optimal	Target Kegiatan pertanian tidak tercapai	C	Rekrutmen tenaga pendamping penyuluh pertanian	4	4	16	Sangat Tinggi	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Petani	Latihan, Kunjungan dan Supervisi baik untuk penyuluh atau petani	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran	
3	27	2.01.01	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok yang meningkat kualitas lembaga taninya	Kapasitas pengurus belum memadai	R1	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Target kelompok yang meningkat kualitas lembaga taninya belum tercapai	C	Koordinasi dengan BPP untuk melakukan pendampingan ,Reorganisasi, dan Pembinaan kelompok	3	3	9	Tinggi	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui anjangsana penyuluh	Kunjungan (anjangsana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran
						Jumlah kelompok yang terlayani pembinaan dan penilaian kelas kelompok	Indikator penilaian kelas kelompok tidak konsisten menunjukan performa kelompok	R2	Hasil penilaian kelas kelompok kurang valid	Kelas kelompok tidak selalu menunjukan kemampuan/ kualitas kelompok	C	Melaksanakan penilaian kelas kelompok sesuai pedoman	4	4	16	Sangat Tinggi	Melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator penilaian kelas kelompok	Koordinasi dengan Koordinator Jabatan Fungsional dan Koordinator Penyuluh terkait indikator penilaian	3	3	9	Tinggi	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran	
						Jumlah kegiatan pengelolaan irigasi partisipatif dan terpadu	Pembangunan Fisik Irigasi belum dilaksanakan	R3	Kegiatan Sekolah Lapang belum optimal	Kegiatan pengelolaan irigasi partisipatif dan terpadu belum optimal	C	Melaksanakan seoptimal mungkin kegiatan yang dapat dilaksanakan	3	3	9	Tinggi	Koordinasi dengan instansi terkait dan optimalisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan	Lebih intensif koordinasi dengan instansi terkait	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran	
						Terlaksananya pembinaan kelompok penerima PMUK, P4K, dan PUAP	Kapasitas pengurus belum memadai	R4	Manajemen kelembagaan kelompok tani belum optimal	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan modal secara bersama belum sesuai target	C	Koordinasi dengan BPP untuk melakukan pendampingan kelompok	3	3	9	Tinggi	Pembinaan dan pendampingan kelompok melalui anjangsana penyuluh	Kunjungan (anjangsana) ke kelompok untuk melakukan pembinaan dan pendampingan	2	3	6	Sedang	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	1 Tahun Anggaran	

Kebumen, 14 Desember 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

Ir. H. TRI HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620111 198603 1 018